

**PERAN AMNESTY INTERNASIONAL DALAM MERESPONS  
PELANGGARAN HAM DI QATAR SAAT PERSIAPAN PIALA  
DUNIA TAHUN 2013-2022  
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**MUHAMMAD DWIPA SYAPUTRA**

20323260

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**PERAN AMNESTY INTERNASIONAL DALAM MERESPONS  
PELANGGARAN HAM DI QATAR SAAT PERSIAPAN PIALA  
DUNIA TAHUN 2013-2022**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**MUHAMMAD DWIPA SYAPUTRA**

20323260

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Peran Amnesty Internasional dalam merespon pelanggaran HAM kepada para pekerja imigran di Qatar dalam persiapan Piala Dunia Tahun 2013-2022**  
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal  
8 November 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



*Karina Utami Dewi*  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 2 Derina Faslig Silitonga, S.Hub.Int., M.H.I.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 4 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

Tanda Tangan

*[Handwritten signatures of the examiners]*

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 28 Oktober 2024



SEKOLAH KIRI NIBRAH  
20 METERA TEMPEL  
BEAMX021520209

---

MUHAMMAD DWIPA SYAPUTRA

## DAFTAR ISI

<b>PERAN AMNESTY INTERNASIONAL DALAM MERESPONS PELANGGARAN HAM DI QATAR SAAT PERSIAPAN PIALA DUNIA TAHUN 2013-2022</b>	i
<b>SKRIPSI</b>	i
<b>PERAN AMNESTY INTERNASIONAL DALAM MERESPONS PELANGGARAN HAM DI QATAR SAAT PERSIAPAN PIALA DUNIA TAHUN 2013-2022</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	iii
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	iv
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>DAFTAR TABEL</b>	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	ix
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	x
<b>ABSTRAK</b>	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang</b>	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	6
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	6
<b>1.4 Cakupan penelitian</b>	7
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	7
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b>	10
<b>1.7 Argumen Sementara</b>	13
<b>1.8 Metode Penelitian</b>	15
1.8.1 Jenis Penelitian	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	16
1.8.4 Proses Penelitian	16
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>	16
<b>BAB 2</b>	18
<b>DINAMIKA PELANGGARAN HAM DALAM PERSIAPAN PIALA DUNIA 2022</b>	18
<b>2.1. Fakta-fakta Pelanggaran HAM di Persiapan Piala Dunia 2022</b>	18
2.1.1 Pelanggaran HAM dalam bentuk Gaji	19
<b>Tabel 2.1 Perbandingan Gaji antara Para Pekerja Imigran dan Non- Imigran</b>	23

2.1.2 Pelanggaran HAM Terhadap Tempat Tinggal	24
<b>Gambar 2.1 Kondisi Tempat Tidur para Pekerja Imigran</b>	26
<b>Gambar 2.2 Kondisi Tempat Tinggal Para Pekerja Imigran yang Tidak Layak</b>	26
2.1.3 Pelanggaran HAM dalam bentuk Diskriminasi berbasis Gender, Ras dan Bangsa	28
2.1.4 Pelanggaran HAM dalam Prosedur Keselamatan	30
<b>Gambar 2.3 Para pekerja Imigran sedang bekerja di depan Lusail Stadium yang sedang dibangun</b>	30
<b>2.2. Penyebab-Penyebab Pelanggaran HAM dalam Persiapan Piala Dunia 2022</b>	31
2.2.1 Sistem <i>Kafala</i>	32
<b>Gambar 2.4 Para pekerja Imigran sedang bekerja di depan Lusail Stadium yang sedang dibangun</b>	33
2.2.1. Dampak Sistem <i>Kafala</i>	33
<b>2.3. Data Korban Kematian Para Pekerja Imigran dari Beberapa Versi</b>	34
2.3.1 laporan Korban Kematian Versi NGO & Media Internasional	35
<b>Tabel 2.2 laporan Korban Kematian Versi NGO &amp; Media Internasional</b>	35
2.3.2. Laporan Kematian versi Pemerintah Qatar dan Pengakuan dari Hassan Al Thawadi	36
<b>Tabel 2.3 laporan Komite Nasional Qatar dan Ketua Komite Piala Dunia 2022</b>	36
<b>BAB 3</b>	37
<b>ANALISIS PERAN AMNESTY INTERNASIONAL DALAM MERESPON PELANGGARAN HAM DI QATAR SAAT PERSIAPAN PIALA DUNIA 2022</b>	37
<b>3.1. Peran Politik dari Amnesty Internasional</b>	37
1. Advokasi dan Lobi	38
2. Pendidikan Publik dan Peningkatan Kesadaran	43
<b>Gambar 3.1 Amnesty Internasional Menggunakan Platform Media Sosial Facebook untuk Memberikan Informasi tentang Pelanggaran HAM di Qatar</b>	44
<b>Gambar 3.2 Amnesty Internasional Menggunakan Platform Media Sosial Twitter (X) untuk Memberikan Informasi tentang Pelanggaran HAM di Qatar</b>	45
<b>Gambar 3.3 Amnesty Internasional Menggunakan Platform Media Sosial Instagram untuk Memberikan Informasi tentang Pelanggaran HAM di Qatar</b>	46
3. Penetapan Agenda	46

<b>Tabel 3.1. Laporan Amnesty Internasional dalam mengkritik pemerintah Qatar dari tahun 2013 hingga tahun 2022</b>	48
<b>4. Pemantauan Aktor Transnasional Lainnya</b>	50
<b>5. Penetapan Agenda dalam Arena Pengambilan Keputusan Global</b>	53
<b>BAB 4</b>	59
<b>PENUTUP</b>	59
<b>4.1. Kesimpulan</b>	59
<b>Tabel 4.1. Aplikasi Teori</b>	59
<b>4.2 Rekomendasi</b>	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Gaji antara Para Pekerja Imigran dan Non Imigran.....	23
Tabel 2.2 Data Korban Kematian Versi NGO & Media Internasional.....	35
Tabel 2.3 Data Korban Nasional Qatar dan Ketua Komite Piala Dunia 2022.....	36
Tabel 3.1 Laporan Amnesty Internasional dalam mengkritik pemerintah Qatar dari tahun 2013 hingga tahun 2022.....	48
Tabel 4.1 Aplikasi Teori.....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kondisi tempat tidur Para Pekerja Imigran .....	26
Gambar 2.2 Kondisi tempat tinggal para Pekerja yang tidak layak.....	26
Gambar 2.3 Para pekerja imigran sedang bekerja di depan Lusail Stadium yang sedang dibangun.....	30
Gambar 2.4 Para pekerja imigran dari berbagai negara datang ke negara Qatar untuk mempersiapkan Piala Dunia 2022.....	33
Gambar 3.1 Amnesty Internasional Menggunakan Platform Media Sosial Facebook untuk Memberikan Informasi tentang Pelanggaran HAM di Qatar.....	44
Gambar 3.2 Amnesty Internasional Menggunakan Platform Media Sosial Twitter (X) untuk Memberikan Informasi tentang Pelanggaran HAM di Qatar .....	45
Gambar 3.3 Amnesty Internasional Menggunakan Platform Media Sosial Instagram untuk Memberikan Informasi tentang Pelanggaran HAM di Qatar.....	46

## DAFTAR SINGKATAN

BBC = *British Broadcasting Corporation*  
CNN = *Cable News Network*  
DUHAM = Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  
HAM = Hak Asasi Manusia  
HRW = *Human Right Watch*  
FIFA = *Federations Internationale de Football Association*  
NGO = *Non-Government Organizations*  
ILO = *International Labour Organization*  
PBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa  
SRA = *Sport & Right Alliance*

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Amnesty Internasional dalam merespon pelanggaran HAM yang dialami pekerja migran di Qatar selama persiapan Piala Dunia 2022. Sebagai NGO, Amnesty Internasional berupaya mengungkap kondisi kerja tidak manusiawi yang dihadapi para pekerja migran dalam pembangunan infrastruktur besar-besaran Qatar. Amnesty menyoroti pelanggaran yang terjadi dalam sistem kafala, seperti keterlambatan gaji, kondisi tempat tinggal yang tidak layak, dan diskriminasi berdasarkan kebangsaan dan prosedur keselamatan tidak memadai. Dengan menggunakan teori NGOs dari Shamima Ahmed dan David M. Potter, penelitian ini membahas bagaimana Amnesty memainkan peran politik melalui advokasi, pendidikan publik dan peningkatan kesadaran, dan penetapan agenda yang menyoroti masalah HAM di Qatar, pemantauan aktor transnasional dan Penetapan Agenda dalam arena pengambilan keputusan global. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Amnesty berhasil menarik perhatian internasional, mengadvokasi hak-hak pekerja migran, dan memberi tekanan pada pemerintah Qatar dan FIFA untuk menerapkan reformasi yang lebih baik dalam hal HAM. Amnesty, bersama organisasi HAM lainnya, terus mendesak Qatar untuk mematuhi standar HAM internasional dan mendesak FIFA agar lebih bertanggung jawab dalam memantau kepatuhan negara tuan rumah terhadap HAM. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran organisasi internasional dalam menyuarakan HAM pada acara besar seperti Piala Dunia.

**Kata Kunci:** Amnesty Internasional, HAM, Qatar, pekerja migran, Piala Dunia 2022.

## ABSTRACT

This study analyzes the role of Amnesty International in responding to human rights violations experienced by migrant workers in Qatar during the preparation of the 2022 World Cup. As an NGO, Amnesty International seeks to expose the inhumane working conditions faced by migrant workers in Qatar's massive infrastructure development. Amnesty highlights violations that occur in the kafala system, such as late wages, inadequate living conditions, and discrimination based on nationality and inadequate safety procedures. Using the NGO theory by Shamima Ahmed and David M. Potter, this study discusses how Amnesty plays a political role through advocacy, public education and awareness-raising, and agenda-setting that highlights human rights issues in Qatar, monitoring transnational actors and Agenda Setting in global decision-making arenas. The research findings show that Amnesty has succeeded in attracting international attention, advocating for migrant workers' rights, and putting pressure on the Qatari government and FIFA to implement better human rights reforms. Amnesty, along with other human rights organizations, continues to urge Qatar to comply with international human rights standards and urge FIFA to be more accountable in monitoring host countries' compliance with human rights. This research confirms the important role of international organizations in voicing human rights at major events such as the World Cup.

**Keywords:** Amnesty International, human rights, Qatar, migrant workers, 2022 World Cup.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Piala Dunia adalah *event* sepakbola antarnegara yang diselenggarakan 4 tahun sekali. Terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia berdasarkan kemenangan Qatar dalam pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2022 yang sebelumnya ada 5 kandidat yaitu: Qatar, Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, dan Jepang. Dengan terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia, Qatar juga menjadi negara dikawasan Timur Tengah pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dan pencapaian terbesar dalam sejarah yang pernah di dapatkan oleh negara Qatar. Karena itu, tepat di tanggal 9 Desember tahun 2010, FIFA sebagai organisasi sepak bola dunia menunjuk Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia (Rahman 2022).

Ditunjuknya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia bukanlah hal yang mudah bagi Qatar. Penunjukan tersebut menimbulkan banyak kritikan dan kontroversi yang terjadi setelah terpilihnya Qatar. Kritikan tersebut berupa iklim dan cuaca di Qatar yang tidak cocok diselenggarakannya Piala Dunia. Biasanya, Piala Dunia diselenggarakan pada bulan Juni hingga Juli atau libur musim panas sekaligus musim liga klub sepak bola sudah berakhir. Permasalahannya, di bulan itu musim panas di negara Qatar sangat panas hingga bersuhu 50°C. Di khawatirkan jika FIFA tetap ingin memaksakan Piala Dunia untuk diadakan di bulan Juni hingga Juli membuat para atlet, staf hingga *fans* akan mengalami dehidrasi tinggi dan bisa menyebabkan kematian akibat cuaca yang sangat panas. Oleh karena itu, Piala Dunia 2022 di Qatar mengalami perubahan jadwal dari Juni hingga Juli menjadi November hingga Desember. Tak hanya itu, Qatar juga di kritik karena belum

memiliki infrastruktur stadion dan fasilitas yang sesuai dengan standar FIFA. Jumlah stadion yang berstandar FIFA hanya satu yaitu stadion Khalifah International Stadium yang berkapasitas hingga 40.000 penonton. Stadion dan fasilitas sesuai standar FIFA untuk Piala Dunia baru akan di bangun setelah terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah. Tidak heran terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia menimbulkan kontroversi atas terpilihnya Qatar menjadi tuan rumah tidak hanya sampai disitu, Pemerintah Qatar juga dituduh melakukan suap terhadap pejabat FIFA agar bisa terpilih menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2022. pro dan kontra di dunia internasional (Amir 2018).

Terpilihnya Qatar juga mengejutkann banyak pihak. Sebab, Qatar mendapatkan Kemenangan dalam persaingan menjadi tuan rumah Piala Dunia mengalahkan 4 negara kandidat lainnya adalah negara yang sudah sering ikut event Piala Dunia tetapi Qatar belum pernah ikut sekalipun berpartisipasi dalam event Piala Dunia dikarenakan Qatar tidak pernah lolos dalam kualifikasi piala dunia. Dikutip BolaSport.com yang dapat dari *Daily Mail* di London menyatakan bahwa, Qatar melakukan suap ke FIFA. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa Qatar telah menyiapkan dana 100 juta dolar AS atau 1,4 triliun rupiah agar bisa terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tindakan tersebut jelas melanggar kode etik untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia yang mana FIFA melarang negara kandidat memberikan keuntungan kepada pejabat FIFA dalam mempengaruhi voting suara untuk menentukan tuan rumah Piala Dunia (Naufal 2022).

Dalam jumlah masyarakat negara Qatar, secara data jumlah penduduk negara Qatar sekitar 2,688 Juta jiwa yang menjadikan Qatar mengalami ketergantungan dengan total pekerja imigran sekitar 90% dan yang 40% adalah

pekerja kontraktor dalam pembangunan untuk mempersiapkan Piala Dunia 2022 (Khan 2021). Karena proyek infrastruktur yang besar, maka pemerintah Qatar memerlukan pekerja dari luar Qatar atau para pekerja imigran. Para pekerja imigran ini berkontribusi besar dalam mengerjakan mega proyek fasilitas dan pembangunan stadion Piala Dunia dengan menggunakan dengan melakukan secara sistem kafala yang sesuai di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang mengatur tentang keternagakerjaan yang berlaku di Qatar (Amnesty International 2016).

Dituduhnya Qatar melakukan pelanggaran HAM terhadap pekerja imigran bermula dari Amnesty Internasional selaku organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam pengungkapan pelanggaran HAM di seluruh dunia. Mereka secara konsisten mengkritik kebijakan pemerintah Qatar, seperti sistem *Kafala*, yang sering mengarah pada penyalahgunaan dan eksploitasi. Melalui laporan-laporannya, Tuduhan tersebut disebutkan bahwa, pemerintah Qatar melakukan pelanggaran HAM antara lain:

- Pembayaran upah gaji pekerja imigran yang tertunda dan banyak para pekerja yang tidak dibayar upah gajinya.
- Mendapat tempat tinggal yang sempit yang tidak layak ditempati oleh para pekerja imigran.
- Diskriminasi Gender, Ras dan Bangsa Terhadap Para Pekerja Imigran.
- Kurangnya informasi tentang prosedur dalam keselamatan bekerja sehingga saat para pekerja imigran rawan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.

Tuduhan pemerintah Qatar melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari laporan Amnesty Internasional yang mengkritisi terhadap buruknya pemerintah Qatar dalam mempersiapkan Piala Dunia dan tuduhan ini menjadi sangat serius bagi pemerintah Qatar karena melakukan pelanggaran HAM kepada para pekerja imigran yang berkontribusi besar dalam mempersiapkan event sebesar Piala Dunia 2022 (Amnesty Internasional 2013).

Amnesty Internasional merupakan suatu organisasi internasional non-pemerintah yang berfokus untuk perlindungan diri dan memperjuangkan nilai-nilai HAM. Amnesty Internasional didirikan pertama kali di tahun 1961 oleh Peter Benenson seorang pengacara dari negara Inggris yang dimana gerakan ini berkembang menjadi organisasi hak asasi manusia global yang berfokus pada penelitian dan advokasi untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia. Amnesty Internasional dikenal sebagai wadah untuk memperjuangkan suara untuk keadilan, kebebasan, dan hak individu di berbagai negara di dunia. Amnesty International mempunyai banyak anggota yang terdiri dari beberapa relawan yang untuk mengungkap upaya mengatasi pelanggaran HAM dari berbagai bentuk penyiksaan, penindasan, hukuman mati, kebebasan ekspresi, dan diskriminasi terhadap sesuatu yang bisa menyebabkan ketidakadilan di berbagai negara. Tujuan Amnesty Internasional dibentuk untuk membuat seluruh dunia bisa menikmati HAM secara nyaman dan diakui secara universal. Amnesty Internasional mempunyai komitmen untuk memperjuangkan semua hak-hak dasar asasi manusia seperti hak beragama, hak dalam berkeadilan, hak perempuan, hak untuk imigran, dan hak dalam menjalani kewajiban sebagai manusia. Saat ini total di seluruh dunia, anggota masyarakat yang ikut dalam organisasi Amnesty

Internasional berjumlah sekitar 10 juta jiwa dari 150 negara yang ikut berkontribusi dalam kampanye HAM di seluruh dunia (Amnesty Internasional 2020). Dalam prosesnya, Amnesty Internasional mempunyai beberapa strategi khusus dalam mengatasi pelanggaran HAM seperti:

- I.** Mengumpulkan informasi laporan pelanggaran HAM (Amnesty Internasional 2013).
- II.** Melakukan aksi simbolik sebagai bentuk dukungan korban (Amnesty Internasional 2013).
- III.** Mendokumentasikan hasil informasi yang telah dikumpulkan oleh Amnesty Internasional (Amnesty Internasional 2013).
- IV.** Memberi Perlindungan Penuh kepada para korban pelanggaran HAM (Amnesty Internasional 2014).
- V.** Melakukan aksi kampanye ke seluruh dunia lewat media sosial maupun lewat aksi nyata (Amnesty Internasional 2016).
- VI.** Membuat gerakan perubahan untuk memaksa pelaku pelanggaran HAM untuk merubah regulasi atau merubah peraturan (Amnesty Internasional 2016).
- VII.** Memperjuangkan hak-hak korban hingga masalah pelanggaran HAM tersebut dapat diselesaikan oleh para pelaku (BBC Indonesia 2016).
- VIII.** Melakukan lobilisasi terhadap masalah pelanggaran HAM (Amnesty Internasional 2020).

Selain itu, Sebagai NGO, Amnesty Internasional banyak mengungkap pelanggaran hak asasi manusia di Qatar sejak tahun 2013, terutama terkait situasi pekerja migran selama persiapan *event* Piala Dunia 2022. Mereka sering mengkritik kebijakan pemerintah Qatar, seperti sistem *Kafala*, yang sering disalahgunakan.

Melalui laporan-laporannya, Amnesty Internasional mendorong Qatar untuk melakukan reformasi, menjadikannya perantara penting antara komunitas internasional dan korban pelanggaran HAM, dan menjadi penggerak perubahan kebijakan yang lebih baik untuk kesejahteraan pekerja migran. Amnesty International sangat relevan dalam kasus Qatar karena mereka memiliki mandat untuk memantau kepatuhan terhadap standar HAM internasional, serta pengalaman dalam membawa isu-isu ini ke perhatian global. Laporan-laporan mereka sering dijadikan rujukan oleh media internasional, lembaga non-pemerintah, dan organisasi HAM lainnya untuk menekan pemerintah Qatar agar memperbaiki kondisi pekerja migran (Amnesty Internasional 2020).

Melalui penelitian skripsi ini, peneliti melakukan analisis dari peran dari Amnesty Internasional dalam upaya merespon pelanggaran HAM di Qatar untuk persiapan Piala Dunia 2013-2022.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana peran Amnesty Internasional dalam merespons pelanggaran HAM di Qatar saat persiapan Piala Dunia tahun 2013-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah di tulis, maka riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui fakta-fakta pelanggaran HAM, penyebab, dan peran pemerintah dalam merespons persoalan tersebut di Qatar.

2. Menjelaskan upaya Amnesty Internasional dalam merespon pelanggaran HAM kepada para pekerja imigran di Qatar saat persiapan Piala Dunia tahun 2013-2022.

#### **1.4 Cakupan penelitian**

Untuk mengetahui penelitian ini, peneliti ingin melakukan “Peran Amnesty Internasional dalam merespon pelanggaran HAM kepada para pekerja imigran di Qatar dalam persiapan Piala Dunia Tahun 2013-2022.” Peneliti memfokuskan utama untuk menggali peristiwa ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang dialami para pekerja imigran yang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur fasilitas untuk persiapan Piala Dunia 2022, sehingga menjadi kontroversi yang membuat NGO yaitu, Amnesty Internasional ikut turun tangan untuk melibatkan diri dalam membela hak-hak mereka. Peneliti memaparkan informasi tentang masalah apa yang dialami oleh para pekerja imigran yang menjadi korban pelanggaran HAM dari pemerintah Qatar dalam persiapan Piala Dunia 2022 Serta, Mengetahui dan kontribusi peran dari Amnesty Internasional dalam merespon dari masalah pelanggaran HAM dari tahun 2013 hingga tahun 2022 yang dimana tahun 2022 merupakan tahun yang diselenggarakannya event Piala Dunia 2022 di Qatar.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Fokus pembahasan dari penelitian ini adalah “Peran Amnesty Internasional dalam Merespons Pelanggaran HAM di Qatar saat Persiapan Piala Dunia Tahun 2013-2022”. Dengan penelitian ini, penulis mencoba melakukan tinjauan beberapa penelitian yang membahas analisis Amnesty Internasional. Dalam melakukan

penelitian, penulis melakukan tinjauan jurnal Amnesty International. Berikut adalah jurnal-jurnal yang sudah diteliti pada penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amnesty Internasional yang berjudul Pelindung Hak Asasi Manusia Pekerja Imigran Piala Dunia Qatar 2022 (Pratama 2023). Dalam jurnal yang dikeluarkan di tahun 2023 tersebut, Amnesty Internasional penelitian ini mengkaji pelanggaran HAM seperti penunggakan gaji, kondisi kerja yang buruk, dan kematian pekerja. Penelitian ini menggunakan teori hak positif dan hak negatif, serta konsep hak asasi manusia dan pekerja migran sebagai kerangka analisis. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder untuk menganalisis kebijakan Qatar, termasuk sistem kafala dan UU Ketenagakerjaan 2020, yang bertujuan melindungi pekerja migran. Meski ada perbaikan, Amnesty Internasional juga menyoroti pemerintah Qatar yang melakukan pelanggaran HAM seperti, tidak mendapat kondisi yang layak, paspor pekerja di sita, kurangnya alat perlindungan yang sesuai dengan standar yang ditentukan, dan kondisi kerja yang jauh dari kata manusiawi yang menyebabkan banyak para pekerja yang meninggal dunia dalam persiapan Piala Dunia 2022 (Pratama 2023).

Kedua, sumber dari jurnal terdahulu yang berjudul Peran Advokasi Amnesty Internasional dalam Kasus Kerja Paksa di Qatar Pada Persiapan 2022 (Sari 2023). Jurnal terdahulu tersebut membahas bagaimana negara Qatar yang ketergantungan terhadap para pekerja imigran. Fenomena tersebut dimulai pada saat pengumuman Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dengan lonjakan penerimaan para pekerja imigran yang signifikan sejak 2011. Sistem yang digunakan untuk mengatur para pekerja imigran tersebut yaitu sistem *Kafala* yang dimana sistem

tersebut menjadi Undang-undang dalam menangani para pekerja imigran. Namun, lembaga Amnesty Internasional protes terhadap kebijakan tersebut karena dianggap melakukan pelanggaran HAM terhadap imigran Qatar, Amnesty International, sebuah organisasi non-pemerintah global yang telah lama memperhatikan isu perbudakan modern di Qatar sejak 2013, menilai bahwa reformasi ini belum menyelesaikan masalah fundamental yang dihadapi pekerja migran. Amnesty International berperan krusial dalam mengadvokasi hak-hak pekerja migran di Qatar selama persiapan Piala Dunia 2022 (Sari 2023).

Ketiga, jurnal yang diambil berjudul *Leveraging the World Cup: Mega Sporting Events, Human Right Risk, and Workers Welfare Reform in Qatar* yang diteliti oleh Sarath K. Ganji (Ganji 2016) yang memaparkan bahwa pemerintah Qatar menggelontorkan dana yang besar untuk *project* dalam persiapan Piala Dunia 2022. Jurnal itu juga menjelaskan bahwa *project* Piala Dunia 2022 ini menjadi project terbesar sepanjang sejarah yang pernah dibuat oleh pemerintah Qatar. Project yang sangat besar tersebut pemerintah Qatar membuat Undang-Undang pekerja buruh yang berlaku buat pekerja untuk persiapan Piala Dunia 2022. Namun, Undang-Undang buruh dan pekerja tersebut sering dilanggar oleh pemerintah Qatar dan tidak sesuai dengan sejalanannya perlakuan yang diterima oleh para pekerja imigran. Dalam jurnal tersebut diketahui bahwa sistem rekrutmen yang ada di dalam Undang-Undang buruh dan pekerja tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Karena itu, banyak para pekerja imigran banyak yang meninggal dunia dan banyak menjadi korban perdagangan dan transaksi secara ilegal karena banyak dari pekerja imigran tersebut masuk ke Qatar dengan ilegal (Ganji 2016).

Karena itu, Penelitian ini berfokus pada peran spesifik Amnesty International dalam menangani pelanggaran HAM selama persiapan Piala Dunia tahun 2013-2022 di Qatar. Amnesty Internasional dipilih karena dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Qatar dalam mengatasi pelanggaran HAM saat persiapan Piala Dunia 2022. Sehingga penelitian ini, akan membahas Amnesty Internasional dalam melakukan analisis yang lebih mendalam menggunakan teori NGOs dari Shmamima Ahmed dan David M. Potter dan melakukan analisis berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang dikeluarkan oleh Amnesty Internasional, termasuk laporan kondisi kerja pekerja imigran, pelanggaran HAM, dan tindakan yang diambil untuk merespon masalah pelanggaran HAM di Qatar yang bermula laporan pertama yang dirilis tahun 2013 hingga tahun 2022 yang dimana tahun 2022 adalah tahun gelarnya Piala Dunia 2022.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

### **Teori NGO dari Shamima Ahmed & David M. Potter**

Sesuai dengan buku yang berjudul “*NGOs in International Politics (2006)*.” Khususnya di Bab 3 tentang “*NGO Roles in International Politics*”. dari Shamima Ahmed & David M.Potter, yang membahas tentang peran NGO dalam kancah politik internasional, khususnya dalam konteks bantuan internasional. Teori ini menjelaskan bagaimana teori NGOs memainkan peran penting dalam kebijakan bantuan dalam skala internasional, Khususnya pada 3 peran sebuah NGO yaitu:

Peran *Relief*: NGO telah ada sepanjang sejarah, didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung kepentingan, dan mendorong

keadilan. Fokus utama NGO Saat ini, NGO memberikan pembangunan perdamaian dan keamanan, di mana mereka berkontribusi pada rekonstruksi dan mempromosikan keamanan tidak cukup untuk mengatasi masalah pembangunan jangka panjang. Mereka mulai manusia melalui berbagai kegiatan pembangunan dan bantuan kemanusiaan (Ahmed & Potter 2006).

Peran Ekonomi dan Sosial: NGO semakin menyadari bahwa bantuan jangka pendek saja fokus pada upaya pembangunan sosial dan ekonomi di negara berkembang.berperan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. NGO memberikan bantuan secara independen mendukung pembangunan dalam rangka mengatasi ketidakadilan dan kemiskinan. NGO menyediakan bantuan secara teknis yang bertujuan untuk mendukung kontribusi terhadap masyarakat dalam soal isu ekonomi & sosial (Ahmed & Potter 2006).

Peran Politik: NGO memperluas pengaruhnya dalam politik internasional yang berada diluar kegiatan bantuan internasional. NGO melakukan advokasi, memberikan pendidikan publik dan menjadi kritikus dalam mengawasi instansi atau pemerintah. NGO berperan penting dalam mengawasi perjanjian internasional dengan organisasi pemerintah yang membawa masalah yang menjadi perhatian publik dalam mendorong perubahan politik global (Ahmed & Potter 2006).

1. Advokasi and Lobi: Dalam Hal ini, NGO melakukan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk mempromosikan perubahan sosial, kebijakan, atau hukum berkontribusi dalam lingkungan masyarakat (Ahmed & Potter 2006).

2. Pendidikan Publik dan Peningkatan Kesadaran: NGO sering memfokuskan pada pendidikan publik sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu global. Jenis informasi tentang NGO ini mampu membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan nasional maupun internasional (Ahmed & Potter 2006).
3. Penetapan Agenda: NGO menetapkan agenda politik, memperkenalkan isu-isu baru, dan mendorong pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan. NGO juga terlibat dalam menyediakan riset dan solusi bagi permasalahan lintas batas seperti polusi dan perdagangan, serta berperan penting dalam konferensi internasional atau memantau perjanjian global (Ahmed & Potter 2006).
4. Pemantauan Aktor Transnasional lainnya: NGO juga bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa negara-negara mematuhi hukum internasional dan perjanjian yang telah mereka tandatangani (Ahmed & Potter 2006).
5. Penetapan Agenda dalam Arena Pengambilan Keputusan Global: Penetapan agenda adalah langkah penting dalam proses kebijakan global yang melibatkan berbagai aktor, termasuk negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan NGO lain sebagai bentuk kerjasama dalam lingkungan masyarakat dunia (Ahmed & Potter 2006).

Teori NGO yang dikembangkan oleh Shamina Ahmed & David M. Potter memberikan kerangka pemahaman tentang peran dan fungsi NGO, termasuk Amnesty Internasional, dalam menyuarakan isu-isu sosial, termasuk kasus Piala Dunia Qatar 2022. Dalam konteks persiapan Piala Dunia Qatar 2022, Amnesty

Internasional telah menggunakan teori-teori NGO untuk mendukung kampanye mereka dalam mengungkapkan pelanggaran HAM yang terjadi selama persiapan turnamen tersebut. Organisasi ini berfokus pada kondisi kerja yang tidak manusiawi bagi pekerja migran yang terlibat dalam proyek pembangunan stadion dan infrastruktur acara.

Peran tersebut dapat dilihat dari landasan untuk NGO khususnya Amnesty Internasional untuk menjalankan misinya untuk memperjuangkan HAM secara universal. Organisasi Amnesty Internasional dapat menyoroti keadaan buruh dan tuntutan HAM yang harus diberikan kepada pekerja migran. Melalui penelitian ini, Amnesty Internasional melakukan advokasi, dan lobi, mereka berusaha untuk mempengaruhi kebijakan dan mendesak perubahan yang positif demi kesejahteraan pekerja imigran. Teori NGO dari Shamina Ahmed dan David M. Potter ini membantu memperkuat peran Amnesty Internasional sebagai pengawas secara independen yang menyuarakan kepedulian dan keprihatinan atas pelanggaran HAM selama persiapan pergelaran Piala Dunia Qatar 2022, dengan tujuan memperbaiki kondisi kerja untuk menyesuaikan HAM yang diperjuangkan oleh Amnesty Internasional.

## **1.7 Argumen Sementara**

Argumen sementara ini menjelaskan rumusan masalah yang ditulis. Penulis menjelaskan tentang “Peran Amnesty Internasional dalam Merespons Pelanggaran HAM di Qatar Untuk Persiapan Piala Dunia Tahun 2013-2022.” Sebagai NGO, Amnesty internasional memainkan peran penting dalam mengungkap pelanggaran HAM selama persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar, dengan fokus pada kondisi

pekerja migran. Menggunakan kerangka teori NGOs dari Shamima Ahmed dan David M. Potter, Peran Amnesty Internasional dianalisis dari peran Relief, peran ekonomi & sosial dan peran politik. Namun, dalam implelementasi teori NGOs, Amnesty Internasional menjalankan penuh perannya sebagai NGO yaitu peran politik. Melalui peran poltik, Amnesty Internasional melakukan advokasi dan lobi ke melalui wawancara kepada para pekerja imigran yang menjadi korban pelanggaran HAM di Qatar sebagai bentuk advokasi tetapi tidak melobi secara langsung, memberikan edukasi dalam pendidikan publik dan peningkatan kesadaran melalui laporan-laporan yang diterbitkan mulai dari tahun 2013-2022 serta bahaya dari pelanggaran HAM, melakukan penetapan agenda melalui riset-riset pelanggaran HAM, Amnesty Internasional dalam pemantauan aktor transnasional lainnya yaitu Amnesty Internasional mengawasi langsung kasus pelanggaran HAM di Qatar, penetapan agenda dalam arena pengambilan keputusan global yang dalam hal terkait bekerja sama dengan lembaga NGO lain dalam merespon pelanggaran HAM di Qatar mempersiapkan Piala Dunia 2022.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah salah metode yang tepat dalam tujuan penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis tidak menggunakan banyak prosedur angka dalam mengumpulkan data. Penelitian kualitatif yaitu salah satu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terdapat dalam subjek penelitian yang dibahas seperti premis, hipotesis, serta background gagasan yang dijelaskan secara deskriptif (Abdussamad 2021).

Penelitian yang bersifat deskriptif menggunakan analisis dengan menggunakan pemahaman suatu masalah yang diangkat dalam penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang menganalisis peran Amnesty Internasional dalam upaya merespon pelanggaran HAM di Qatar untuk persiapan Piala Dunia 2013-2022.

### **1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dan objek penelitian yang berjudul “Analisis Peran Amnesty Internasional dalam Merespon Pelanggaran HAM Qatar Untuk Persiapan Piala Dunia Tahun 2013-2022” yaitu Amnesty Internasional sebagai subjek dan objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Qatar sebagai institusi yang melakukan pelanggaran HAM.

### 1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian dengan menggunakan metode penelitian sekunder. Hasil data yang dikumpulkan dalam menjawab rumusan masalah, kemudian di analisis dengan metode data yang diperoleh dari data yang menggunakan teori yang sudah digunakan di dalam jurnal, artikel, dan buku yang berkaitan dengan peran Amnesty dalam upaya merespon pelanggaran HAM di Qatar pada Persiapan Piala Dunia 2013-2022.

### 1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penulis mengumpulkan data untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah yang dilanjutkan penulis dengan menganalisis data yang dikumpulkan dan menggunakan teori yang diperoleh penulis.

## 1.9 Sistematika Pembahasan

**Bab I:** Pada bab ini, penelitian ini akan membuat melakukan penelitian yang meliputi pendahuluan yang diikuti oleh latar latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan sebagai sistematika pembahasan.

**Bab II:** Pada bab ini, penelitian akan membahas tentang bentuk pelanggaran HAM apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Qatar. Selain itu, pada bab ini juga melakukan tinjauan literatur tentang jenis-jenis pelanggaran HAM dan dampak dari pelanggaran HAM yang terjadi pada para pekerja imigran dalam persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar.

**Bab III:** Penulis akan menjawab rumusan masalah kemudian dijawab berdasarkan kerangka pikiran dengan menggunakan data yaitu menjawab masalah Bagaimana Peran Amnesty Internasional dalam menganalisis pelanggaran HAM di Qatar pada persiapan Piala Dunia tahun 2022 menggunakan teori NGO dari Shamima Ahmed dan & David M. Potter sekaligus dampak dari peran Amnesty Internasional untuk pemerintah Qatar dan masyarakat dunia.

**Bab IV:** Penulis menuliskan perubahan kesimpulan dan saran melalui hasil dari temuan yang diteliti yang bisa dijadikan rekomendasi yang dibutuhkan oleh pembahasan untuk proyeksi kedepan dan saran penelitian dalam penelitian ini.

## **BAB 2**

### **DINAMIKA PELANGGARAN HAM DALAM PERSIAPAN PIALA DUNIA 2022**

#### **2.1. Fakta-Fakta Pelanggaran HAM di Persiapan Piala Dunia 2022**

Untuk mempersiapkan *event* Piala Dunia 2022, kondisi aspek penting seperti infrastruktur fasilitas dan sumber daya manusia berupa para pekerja yang menjadi bagian dari pendukung dalam *project* dalam persiapan Piala Dunia. Maka dari itu, pemerintah Qatar wajib mempersiapkan aspek tersebut sebagai bagian dari keseriusan dalam menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk 2022 (FIFA 2018).

Pemerintah Qatar membuka lapangan pekerjaan kepada para pekerja yang bukan hanya untuk masyarakat Qatar saja, tetapi pemerintah Qatar juga membuka peluang kepada masyarakat dunia khususnya, kepada masyarakat imigran yang berasal dari luar negara Qatar yang belum mendapatkan pekerjaan. Sejak dibukanya pendaftaran tersebut. Jumlah pendaftar yang meningkat secara signifikan juga membuat pemerintah Qatar menjadi untung besar dalam mempersiapkan event Piala Dunia untuk tahun 2022. Total jumlah para pekerja imigran yang berhasil direkrut oleh pemerintah Qatar dalam persiapan Piala Dunia mencapai 1,5 Juta dari berbagai negara seperti Bangladesh, India dan Pakistan (Human Right Watch 2019).

Namun, Terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam persiapan Piala Dunia 2022 tersebut. Berikut beberapa fakta-fakta masalah yang terjadi dalam persiapan Piala Dunia 2022 dan penyebab-penyebabnya.

### 2.1.1 Pelanggaran HAM dalam bentuk Gaji

Pada kenyataannya, terdapat banyak laporan-laporan serius yang menyebabkan persiapan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia menjadi polemik dan menyebabkan kontroversi bagi pemerintah Qatar. Laporan pemerintah Qatar sebagai pelaku dari pelanggaran HAM menjadi masalah serius bagi pemerintah Qatar dan membuat persiapan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 menjadi terganggu. Laporan tersebut berisi tentang pemerintah Qatar telah melakukan pelanggaran HAM terhadap para pekerja imigran yang berkontribusi dalam persiapan Qatar sebagai tuan rumah Qatar. Laporan tersebut berasal dari lembaga non-pemerintah yaitu dari NGO (*Non-Government Organization*) dan jurnalis-jurnalis internasional yang ikut mengawasi dalam pembangunan untuk persiapan Piala Dunia tahun 2022 (Amnesty Internasional 2022).

Laporan masalah pelanggaran HAM ini berkembang pertama kali muncul dari laporan *Human Rights Watch* (2012). *Human Right Watch* melaporkan tersebut bahwa, adanya hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi. Hak-hak tersebut seperti tempat hidup yang tidak layak dan upah gaji yang belum dibayar dan pemerintah Qatar seperti memberlakukan para pekerja imigran seperti kerja paksa. Sistem *kafala* yang diterapkan pemerintah Qatar kepada para pekerja imigran ternyata memberikan efek negatif dan banyak terjadi pelanggaran HAM selama pembangunan untuk persiapan Piala Dunia tersebut (Human Right Watch 2012).

Kemudian dari NGO berikutnya dari Amnesty Internasional juga ikut mengawasi persiapan Piala Dunia yang dirilis tanggal 29 Oktober 2013 dalam judul “*Qatar: Amnesty International launch of report placing the spotlight on Qatar’s construction sector ahead of the World Cup*” (Amnesty Internasional 2013).

Laporan yang dirilis ke publik pada tanggal 17 November 2013. Dalam laporan ini, Amnesty Internasional berencana untuk menganalisis ruang lingkup pekerjaan pekerja migran di Qatar ketika pekerjaan konstruksi untuk Piala Dunia 2022 dimulai (Amnesty Internasional 2013).

Dalam laporan tersebut juga menyebutkan, Amnesty Internasional melakukan wawancara terhadap pekerja imigran. Selain itu Laporan dari Amnesty International (2013) yang berjudul "*The Dark Side of Migration: Spotlight on Qatar's Construction Sector Ahead of the World Cup.*" Laporan Amnesty Internasional memberikan sorotan khusus pada sektor konstruksi di Qatar menjelang Piala Dunia FIFA 2022. Amnesty International menggunakan laporan ini untuk menggambarkan kondisi kerja yang serius dan pelanggaran hak-hak pekerja migran. Melalui wawancara langsung dengan 132 pekerja migran, laporan ini membongkar perlakuan diskriminatif, kondisi tempat tinggal yang tidak manusiawi, dan pelanggaran hak-hak pekerja. Hasilnya, para buruh imigran mengaku mendapatkan perlakuan diskriminatif dan tidak manusiawi sejak tahun 2012 (Amnesty International 2013).

Hal ini menjadi kontroversi yang serius karena negara-negara tujuan Piala Dunia biasanya diharapkan untuk menjalankan standar HAM yang lebih baik. Pelanggaran HAM ini dapat merusak reputasi negara dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kepatuhan negara tersebut dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia (Amnesty Internasional 2022). Permasalahan gaji atau upah yang bermasalah akibat pembayaran tertunda dan tidak dibayar adalah masalah hal yang seirus bagi pemerintah Qatar. Dalam konteks pekerjaan, upah gaji adalah hal yang wajib dibayar oleh suatu institusi dan jika dibayar telat ataupun

tidak dibayar akan menimbulkan masalah besar. Laporan dari beberapa NGO dan media internasional mengungkapkan secara jelas antara lain:

- Permasalahan Gaji yang tertunda:

Pembayaran gaji yang tertunda merupakan bentuk masalah yang dihadapi oleh para pekerja imigran yang terlibat dalam persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar. Pembayaran gaji secara terlambat ini membuat para pekerja imigran terpaksa harus membayar lebih atau berhutang yang membuat kehidupan para pekerja imigran menjadi lebih sulit. Penundaan gaji ini menjadi tekanan besar secara finansial dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka yang berasal dari masing-masing negara asal. Kasus pelanggaran HAM terhadap para pekerja imigran terbongkar pertama kali di tahun 2012 dari media sekaligus lembaga NGO yaitu dari laporan HRW yang berisi tentang adanya pelanggaran HAM yang ada dalam persiapan Piala Dunia tahun 2022 (Human Right Watch 2012).

- Tidak dibayarnya Gaji Secara Sepihak:

*Human Right Watch* membuat laporan dalam bentuk laporan yang merupakan isi dari hak-hak pekerja imigran yang belum terpenuhi. Hak upah gaji yang tidak dibayar oleh pemerintah Qatar disebabkan oleh buruk sistem *kafala* yang diterapkan oleh pemerintah Qatar. Ketidakpastian ini menjadi menjadi sumber masalah baik bagi para pekerja imigran maupun dari pemerintah Qatar yang dimana upah gaji adalah sumber pendapatan bagi para pekerja imigran (Human Right Watch 2020).

*Human Right Watch* menuntut pemerintah Qatar untuk segera selesaikan pembayaran gaji tersebut. *Human Right Watch* melaporkan, berbagai kasus gaji yang tidak dibayar dan menghadapi penundaan dalam jangka waktu yang lama

menjadi masalah bagi para pekerja imigran sehingga sulit bagi para pekerja imigran untuk bertahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan keluarga dari para pekerja imigran (Human Right Watch 2022).

Selain *Human Right Watch*, Amnesty Internasional juga membahas tentang bahwa ada 78 pekerja imigran yang gajinya belum dibayar sejak februari 2016, yang dimana para pekerja imigran hanya bekerja untuk Lusail Stadium. Amnesty Internasional mengkritik keras sistem *kafala* yang dianggap sebagai perbudakan modern karena Qatar menghapuskan izin keluar dari negara Qatar sebelum pembangunan infrastruktur untuk persiapan Piala Dunia 2022 rampung (Kompas 2018)

Laporan dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) bahwa, masalah gaji adalah masalah yang paling sering dikeluhkan para pekerja imigran selama persiapan Piala Dunia. Dalam waktu dekat protes terhadap gaji pekerja imigran yang belum dibayar meningkat seiring dengan gelombang protes yang dilakukan oleh para pekerja imigran. Jumlah keluhan dari pekerja imigran dikabarkan mencapai 34.425 kali meningkat dua kali lipat dari berbagai platform (VOA Indonesia 2022).

Sebagai organisasi buruh, ILO juga melaporkan upah mencatat bahwa total 10.500 kasus yang kasusnya membawa ke ruang pengadilan buruh dan semua kasus tersebut telah didukung penuh tetapi dalam fakta di lapangan, kasus tersebut belum selesai dan masih menjadi masalah besar bagi para pekerja imigran yang ada di negara Qatar (Wijaya 2022).

**Tabel 2.1 Perbandingan Gaji antara Para Pekerja Imigran dan Non-Imigran**

<b>Kriteria</b>	<b>Pekerja Imigran</b>	<b>Non-Migran</b>
Gaji Rata-Rata	\$275 - \$350 per bulan	\$5,000-\$10,000 per bulan
Gaji Buruh Kasar	\$200-\$250 per bulan	Tidak diketahui
Gaji Pekerja Terampil	\$400 - \$500 per bulan	Tidak diketahui

Sumber: Amnesty Internasional (2022), The Guardian (2021).

Dalam hal ini, masalah pembayaran gaji menimbulkan polemik yang mendiskriminasi antara para pekerja imigran dengan majikan mereka. Akibat masalah tersebut, para pekerja imigran bekerja menjadi kurang maksimal karena para pekerja imigran harus bekerja dengan semua kondisi ekstrem yang tidak bisa memilih (Jureidini & Hassan 2019).

Dampak yang ditimbulkan dari gaji para pekerja yang tidak dibayar:

- Sulit dalam keuangan:

Keuangan adalah salah satu aspek yang paling penting bagi para pekerja tak terkecuali para pekerja imigran. Masalah nunggaknya gaji para pekerja imigran yang menjadi faktor yang berpengaruh kepada para pekerja imigran Dengan tidak dibayar nya gaji upah dari para pekerja imigran menyebabkan kebutuhan *primer* sehari-hari para pekerja imigran tidak terpenuhi seperti sandang,pangan dan papan (Aceh Tribun News 2022).

- Stress dan Depresi:

Informasi pembayaran gaji yang tidak jelas dan membuat para pekerja imigran mengalami setres berat dan rentan mengalami depresi sehingga mengalami kehidupan yang tidak terkontrol karena mengeluhkan masalah gaji tersebut (Deutsche Welle 2021).

- Hutang menjadi solusi sementara:

Karena sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa para pekerja imigran melakukan utang yang menjadi solusi sementara. Namun, utang ini menjadi jauh lebih sulit karena para pekerja imigran masuk ke dalam lingkaran hutang yang tidak tahu kapan harus dibayar (Pratama 2018).

- Ketergantungan kepada pemerintah Qatar:

Ketergantungan secara terus-menerus menimbulkan ketidakadilan bagi para pekerja imigran. Pekerja imigran harus menggantungkan nasibnya ke pemerintah Qatar dan hal ini bentuk pelanggaran HAM yang berat buat pemerintah Qatar (Amnesty Internasional 2022). Hal ini menjadi kontroversi yang serius karena negara-negara tujuan Piala Dunia biasanya diharapkan untuk menjalankan standar HAM yang lebih baik. Pelanggaran HAM ini dapat merusak reputasi negara dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kepatuhan negara tersebut dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia (Amnesty Internasional 2022).

#### 2.1.2 Pelanggaran HAM Terhadap Tempat Tinggal

Dalam konteks ini, perlu memahami secara mendalam mengenai akibat dari tempat tinggal yang sempit dan buruk ini terhadap kehidupan sehari-hari pekerja imigran di Qatar. Lingkungan yang sempit dan tidak nyaman menciptakan tekanan psikologis yang berpotensi meningkatkan risiko stres dan kecemasan. Ketidaknyamanan tempat tinggal yang mereka alami dapat menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran mengenai kondisi hidup mereka, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental secara keseluruhan. Gaji yang tidak dibayar diperparah dengan kondisi tempat tinggal yang tidak layak membuat para pekerja imigran menjadi makin menderita. Para pekerja migran dilaporkan tinggal dalam

kondisi tempat tinggal yang sangat buruk, seperti kamar tidur yang sempit tanpa jendela, dan dalam beberapa kasus. Mereka juga ditempatkan dalam ruangan yang penuh sesak (The Guardian 2014).

Tempat tinggal yang sempit, bau dan tidak higienis dan kurang memadai. Tidak higienis bisa dilihat dari kondisi kamar mandi para pekerja imigran yang hanya diberikan satu kamar mandi umum saja untuk satu tempat tinggal para pekerja imigran selama bekerja di Qatar (Koestanto 2021).

Pemerintah Qatar juga tidak membangun fasilitas lain seperti dapur sehingga semua barang-barang dari para pekerja imigran hanya bertumpuk di kamar dan menyebabkan kondisi kamar menjadi lebih sempit. Kondisi ini membuat kondisi para pekerja imigran semakin parah mengingat kamar adalah tempat istirahat bagi para pekerja imigran setelah bekerja. Selain itu, para pekerja imigran juga mendapatkan tempat tinggal dipaksa untuk tinggal yang jauh dari kata layak. Dalam pengakuan dari para pekerja imigran, Ventilasi yang minim, air bersih yang sulit dan kamar yang sempit justru didapatkan oleh para pekerja imigran selama tinggal di asrama yang disediakan oleh pemerintah Qatar (Liputan 6 2022).

**Gambar 2.1 Kondisi Tempat Tidur para Pekerja Imigran**



Sumber : Amnesty Internasional (2016)

Gambar di atas memperlihatkan bahwa, buruknya pemerintah Qatar dalam menyediakan fasilitas asrama tempat tinggal kepada para pekerja imigran. Oleh karena itu, beberapa pekerja imigran mengalami konsekuensi yang sangat buruk dalam kondisi kesehatan para pekerja imigran.

**Gambar 2.2 Kondisi Tempat Tinggal Para Pekerja Imigran yang Tidak Layak**



Sumber : Amnesty Internasional (2016)

Ketidaklayakan tempat tinggal ini juga menimbulkan risiko kebocoran air dan panas, yang dapat menyebabkan kondisi yang tidak sehat dan berpotensi mengancam keselamatan pekerja. Dalam kondisi panas ekstrem yang umumnya dihadapi oleh negara-negara di Teluk, pekerja imigran yang tinggal dalam kondisi yang sempit dan tidak layak mungkin tidak memiliki akses ke air yang cukup atau ventilasi yang baik, yang berpotensi menyebabkan dehidrasi dan kondisi kesehatan lainnya.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) telah mengungkapkan bahwa ada 10.500 kasus yang dibawa ke pengadilan perburuhan, dengan keputusan hakim terkait hampir semua kasus mendukung pekerja. Ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya terbatas pada satu atau dua kasus, tetapi merupakan isu yang luas dan sistematis (ILO 2021).

Para pekerja migran dilaporkan tinggal dalam kondisi tempat tinggal yang sangat buruk, seperti kamar tidur yang sempit tanpa jendela, dan dalam beberapa kasus, paspor mereka disita oleh kepala mandor. Mereka juga ditempatkan dalam ruangan yang penuh sesak (The Guardian 2014). Dampak yang ditimbulkan dari tempat tinggal yang sempit yang tidak layak ditempati kepada pekerja imigran:

#### I. Kesehatan Pekerja Imigran:

Minim nya air bersih, ventilasi yang buruk, kamar yang sempit, kamar mandi hanya satu menjadi sarang penyakit bagi para peeker a imigran sehingga para pekerja imigran rentan terhadap penyakit (Pratama 2022).

#### II. Tidak Ada Ruang Beraktivitas:

Sempitnya ruang kamar untuk beristirahat membuat para pekerja sulit untuk beraktivitas pada manusia umumnya yang berpengaruh kepada kesehatan fisik maupun mental (Pramata 2022).

### III. Risiko Cedera Akibat Ruang Isitrahahat Sempit:

Risiko cedera akibat keterbatasan ruang untuk beristirahat adalah salah satu faktor yang dimana banyak para pekerja imigran yang mengalami sakit fisik maupun mental sehingga ruang yang sempit menjadi faktor dalam cederanya para pekerja imigran (Pratama 2022).

#### 2.1.3 Pelanggaran HAM dalam Bentuk Diskriminasi Berbasis Gender, Ras dan Bangsa

Diskriminasi juga salah satu isu serius yang dihadapi oleh para pekerja imigran selama persiapan Piala Dunia untuk tahun 2022. Terdapat banyaknya kegiatan diskriminasi yang terjadi selama pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022. Maraknya terjadi diskriminasi terhadap para pekerja imigran yang bekerja dalam persiapan Piala Dunia 2022. Dikutip dari *The Guardian* melaporkan lebih lanjut mengenai kondisi pekerja migran di Qatar, dengan judul "Qatar's migrant workers: 'We're treated like animals.'" Artikel ini melibatkan eksplorasi lebih dalam terhadap perlakuan yang mencerminkan perlakuan terhadap hewan terhadap pekerja migran. Kondisi kerja yang diberlakukan secara diskriminasi. (The Guardian 2015).

Selain diperlakukan seperti binatang, para pekerja imigran juga mendapat tindak diskriminasi dalam hal lain seperti diskriminasi gender, rasial, diskriminasi akses kesehatan yang menjadi masalah serius bagi pemerintah Qatar antara lain:

- Diskriminasi Gender:

Diskriminasi gender menjadi marak terjadi khususnya kepada para pekerja imigran yang khususnya jenis kelamin perempuan yang mengalami diskriminasi lebih besar. Kebijakan seperti pengajuan paspor terhadap imigran perempuan yang dimana ada kebijakan yang dianggap membatasi ruang lingkup perempuan sebagai pekerja imigran dianggap sebagai faktor utama bagaimana kegiatan diskriminasi yang terjadi dalam persiapan Piala Dunia yang dianggap pelanggaran HAM (Human Right Watch 2022).

- Diskriminasi Ras:

Ada beberapa menjadi stigma para pekerja imigran yang menjadi hal yang normal membuat situasi makin sulit yang dimana ini bersamaan dengan pandemi covid-19 dimana terdapat banyak korban dari para pekerja imigran yang terpapar virus tersebut namun dalam mengatasi covid-19, pemerintah Qatar melakukan pemeriksaan kesehatan secara tidak adil dan sulit nya akses kesehatan untuk para pekerja imigran, Beberapa ada yang melakukan penolakan terhadap pemeriksaan kesehatan seperti para pekerja imigran yang sakit virus covid-19 harus diusir dari tempat tinggal para pekerja imigran yang sempit dan diperparah dengan jika ada para pekerja imigran yang meninggal, jasad jenazah para pekerja imigran yang terpapar tersebut mendapat penolakan untuk pemakaman jenazah yang terpapar covid-19 (Pratama 2022).

- Diskriminasi berdasarkan kebangsaan:

Para pekerja imigran terdiri dari atas berbagai negara karena itu juga yang membuat seringnya mengalami diskriminasi dari berbagai negara. Para pekerja imigran diberlakukan secara tidak adil oleh pemerintah Qatar melalui pelecehan secara fisik, pelecehan verbal maupun mental (Nurfajiani 2022).

Isu diskriminasi yang dihadapi pemerintah Qatar dalam mempersiapkan Piala Dunia jadi kritikan bagi seluruh dunia yang menggambarkan betapa buruk Qatar dalam mempersiapkan Piala Dunia tahun 2022 ini.

#### 2.1.4 Pelanggaran HAM dalam Prosedur Keselamatan

Informasi tentang prosedur dalam keselamatan kerja dalam setiap proyek merupakan salah satu aspek penting dalam suatu proyek besar seperti proyek infrastruktur Piala Dunia Tahun 2022. Informasi keselamatan kerja dibuat bertujuan untuk mencegah resiko kecelakaan kerja. Namun dalam mempersiapkan Piala Dunia, Pemerintah Qatar tidak memberikan informasi prosedur keselamatan dengan maksimal sehingga, banyaknya resiko kecelakaan kerja dan kematian yang tidak bisa dihindari. Kurangnya informasi juga mempengaruhi dari sisi keamanan keselamatan para pekerja imigran yang menyebabkan kecelakaan maupun kematian para pekerja imigran (Vaidyanathan 2022).

#### **Gambar 2.3 Para pekerja Imigran sedang bekerja di depan Lusail Stadium yang sedang dibangun**



Sumber: Indo Progress (2020).

Tidak hanya itu, kurangnya informasi juga dari hasil investigasi oleh media seperti *The Guardian* menyebutkan, Sejak diumumkan nya Piala Dunia di Qatar, korban para pekerja imigran yang bekerja sebagai buruh pabrik mengalami kematian sebanyak 12 pekerja setiap pekan. Tercatat kasus kematian pada pekerja imigran meningkat setiap tahun dari tahun 2010-2020 saja ada kematian yang berjumlah 5.297 jiwa para pekerja imigran berasal dari Sri Lanka dan Bangladesh dan 824 jiwa dari negara Pakistan (Walid 2022). Berdasarkan data ini bahwa, pentingnya alat prosedur keselamatan bekerja saat bekerja, tetapi para pekerja mengalami deskriminasi yang dimana para pekerja imigran sering bekerja tanpa alat keselamatan yang memadai. Selain itu, pemerintah Qatar wajib memerlukan kesadaran terhadap keselamatan para pekerja yang bertujuan agar bisa meningkatkan keselamatan terhadap pekerja imigran (Amnesty Internasional 2016).

## **2.2. Penyebab-Penyebab Pelanggaran HAM dalam Persiapan Piala Dunia**

**2022**

Namun, Pada kenyataannya, banyak laporan-laporan yang menimbulkan kontroversi yang menjadi polemik tentang dalam persiapan Piala Dunia tersebut, khususnya masalah pelanggaran HAM terhadap para pekerja imigran. Laporan Masalah pelanggaran HAM tersebut beragam sehingga dengan adanya kontroversi tersebut, pemerintah Qatar harus menghadapi isu-isu yang serius terhadap kondisi para pekerjaan Imigran pada persiapan Piala Dunia 2022 tersebut (Amnesty Internasional 2022). Laporan tersebut berasal dari lembaga non-pemerintah (*Non-Governmental Organizations*) dan jurnalis-jurnalis internasional yang ikut mengawasi dalam pembangunan untuk persiapan Piala Dunia 2022. Lembaga tersebut memberitakan sekaligus melaporkan awal mulanya pelanggaran HAM

dalam persiapan Piala Dunia 2022. Sistem *kafala* yang menjadi kontrol utama dalam mengatur para pekerja imigran merupakan faktor utama yang membuat pelanggaran HAM sering terjadi, dari yang kecil (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner 2021).

### 2.2.1 Sistem *Kafala*

Sistem *kafala* merupakan sistem yang umum yang digunakan di negara yang berada di kawasan Timur Tengah khususnya negara yang termasuk dalam anggota Gulf Cooperation Council (GCC), seperti Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirates Arab (UEA). Karena itu, Sistem *kafala* ini diterapkan oleh pemerintah Qatar dalam mempersiapkan Piala Dunia. Sistem *kafala* juga membuat para pekerja imigran sangat bergantung kepada pemerintah Qatar, termasuk pemberian izin *Visa* kerja sebagai bukti dari legalnya para imigran bekerja di negara Qatar (Hapsari & Hanura 2022).

Dalam persiapan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia, pemerintah Qatar memberlakukan sistem *kafala* atau *kafala system* yang dimana sistem tersebut dimaksudkan untuk menjebatani hubungan antara hubungan pekerja dengan sponsorship atau majikan sebagai pelaku utama dalam menjalankan *project* tersebut serta, menetapkan regulasi dalam memberikan *Visa* izin kerja kepada para pekerja yang berasal dari luar negara tersebut (Naufal 2021).

**Gambar 2.4 Para pekerja Imigran sedang bekerja di depan Lusail Stadium yang sedang dibangun**



Sumber: Human Right Watch (2012)

Walaupun, sudah memberlakukan sistem *kafala* sebagai perlindungan terhadap para pekerja imigran dan menjadi peluang besar bagi pemerintah Qatar dalam membuka lapangan pekerjaan terhadap masyarakat dan imigran.

#### 2.2.1. Dampak Sistem *Kafala*

Para imigran mengalami perlakuan seperti gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal, mendapat tempat tinggal yang tidak layak seperti kamar tidur yang sangat sempit, tanpa jendela, bahkan paspor dari masing-masing pekerja imigran disita oleh kepala mandor. Tidak hanya itu, Pekerja migran melakukan pekerjaan konstruksi di suhu ekstrem, mencapai 52°C, tanpa perlindungan diri yang memadai. Selain itu, mereka tidak mendapatkan istirahat yang cukup dan seringkali terlambat dalam menerima makanan (International Trade Union Confederation 2014).

Dampak dari sistem *kafala* yang berujung perbudakan modern:

1. Kondisi Pekerja Yang Tidak Layak:

Sistem kafala membuat banyak masalah termasuk pembayaran upah yang tertunda, tempat tinggal yang tidak layak, dan perlakuan seperti kerja paksa. Pekerja migran juga dilaporkan mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi sejak tahun 2012 (Amnesty Internasional 2013).

2. Kekerasan dan Penangkapan:

Beberapa pekerja migran dilaporkan mengalami kekerasan dan penangkapan oleh pihak berwenang setelah mengajukan keluhan atau protes terhadap kondisi kerja dan pembayaran yang tidak adil. (The Guardian 2014).

3. Kurangnya Perlindungan Terhadap Pekerja Imigran:

Maraknya Pelanggaran HAM akibat efek dari buruknya pemberlakuan sistem kafala terhadap para pekerja imigran. Kurangnya sistem perlindungan hukum terhadap pekerja imigran Qatar juga menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran HAM (Malaeb 2015).

### **2.3. Data Korban Kematian Para Pekerja Imigran dari Beberapa Versi**

Banyaknya kontroversi yang terjadi pada persiapan Piala Dunia 2022 ini menjadi terganggu. Selain itu, banyaknya korban kematian dari pelanggaran HAM juga menimbulkan kontroversi bagi pemerintah Qatar sebab, tidak ada data yang secara spesifik tentang banyaknya korban kematian dalam kasus pelanggaran HAM ini dan pemerintah Qatar juga tidak menampilkan data secara spesifik dan resmi hanya menampilkan seadanya saja. Ini jelas menimbulkan kecurigaan bagi dunia internasional dan beberapa media bahkan menyebutkan bahwa, korban kematian

dari pelanggaran HAM yang ada di persiapan Piala Dunia ini jumlahnya ribuan tetapi pemerintah Qatar jelas menolak tuduhan tersebut dan hanya menampilkan data dari beberapa kematian yang jelas berbeda jauh dari apa yang ditampilkan oleh lembaga dan media internasional yang mengeluarkan angka kematian yang jauh lebih banyak ketimbang pemerintah Qatar. Berikut laporan data kematian para pekerja imigran dari beberapa versi dan periode:

### 2.3.1 laporan Korban Kematian Versi NGO & Media Internasional

**Tabel 2.2 laporan Korban Kematian Versi NGO & Media Internasional**

<b>Media</b>	<b>Jumlah Kematian</b>	<b>Penyebab Kematian</b>	<b>Periode</b>
Amnesty International	15.021 korban jiwa	Dalam proyek Piala Dunia 2022	2012-2022
The Guardian	5.297 korban jiwa	Dalam proyek Piala Dunia 2022	2010-2022
BBC	6.500 korban jiwa	Dalam proyek Piala Dunia 2022	2020-2021
Human Right Watch	6.750 korban jiwa	Dalam proyek Piala Dunia 2022	2012-2021

Sumber: Amnesty International (2022), The Guardian (2020), BBC (2021), Human Right Watch (2021).

Laporan tersebut diambil dari beberapa media & NGO yang mengkritik keras pemerintah Qatar yang melakukan pelanggaran HAM terhadap pekerja imigran ini. Sejauh ini ada beberapa versi tetapi, paling banyak menyebutkan bahwa

jumlah korban tersebut sekitar 6500 korban jiwa. Jumlah yang sangat banyak ini tak lepas dari lengahnya pemerintah Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia.

2.3.2. Laporan Kematian versi Pemerintah Qatar dan Pengakuan dari Hassan Al Thawadi

**Tabel 2.3 laporan Komite Nasional Qatar dan Ketua Komite Piala Dunia  
2022**

<b>Sumber</b>	<b>Jumlah Kematian</b>	<b>Penyebab Kematian</b>	<b>Periode</b>
Komite Nasional Qatar	414 Korban Jiwa	Non-proyek Piala Dunia 2022	2014-2021
Hasan Al-Thawadi (Ketua Komite Piala Dunia 2022)	400-500 Korban Jiwa	Non-proyek Piala Dunia 2022	2010-2022

Sumber: CNBC (2022), Liputan 6 (2022)

Laporan dari pemerintah Qatar sendiri tidak secara spesifik dan cenderung menutupi. Beberapa menyebutkan bahwa, total jumlah dari korban dari persiapan Piala Dunia tahun 2022 ini awalnya berjumlah 414 kemudian muncul jumlah korban dari ketua komite Piala Dunia tahun 2022 yaitu dari Hasan Al-Thawadi yang menyebutkan bahwa jumlah korban tersebut sekitar 400-500 korban jiwa dalam wawancaranya bersama Piers Morgan (Caritau 2022).

## **BAB 3**

### **ANALISIS PERAN AMNESTY INTERNASIONAL DALAM MERESPON PELANGGARAN HAM DI QATAR SAAT PERSIAPAN PIALA DUNIA 2022**

Berdasarkan teori *NGOs International Politics* khususnya di bab 3 yang ditebarkan pada tahun 2006. Shamima Ahmed & David M. Potter memaparkan bahwa, peran NGO tersebut ada 3 yaitu, peran *Relief*, Ekonomi & Sosial dan Peran Politik (Ahmed & Potter 2006).

#### **3.1. Peran Politik dari Amnesty Internasional**

Peran politik pada NGO adalah advokasi, memberikan pendidikan publik dan menjadi kritikus dalam mengawasi instansi atau pemerintah. sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik dan keputusan politik. Kegiatan NGO berperan penting advokasi & lobi, pendidikan publik & peningkatan kesadaran, penetapan agenda, pemantauan aktor transnasional, penetapan agenda dalam Arena pengambilan Keputusan global keterlibatan dalam forum-forum internasional dan domestik untuk mempromosikan isu-isu tertentu yang menjadi perhatian publik dalam mendorong perubahan politik global (Ahmed & Potter 2006).

Dalam hal ini Amnesty Internasional berkontribusi banyak dalam perannya sebagai NGO khususnya sebagai peran politik, Amnesty Internasional menyadari bahwa menolong korban dari kasus pelanggaran HAM itu harus melalui juga dari peran politik. Korban dari pelanggaran HAM tersebut berasal dari para pekerja imigran yang mendapat perlakuan tidak manusia seperti diskriminasi dan di

eksploitasi secara tidak manusiawi hanya untuk pembangunan infrastruktur dalam persiapan Piala Dunia tahun 2022 (Amnesty Internasional 2022).

Tugas utama dari Amnesty International adalah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pelanggaran HAM. Melalui riset lapangan, analisis mendalam, dan pengumpulan bukti yang akurat, organisasi ini menyajikan laporan yang kuat dan objektif tentang kondisi HAM di suatu wilayah. Laporan-laporan ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang situasi, tetapi juga membuka mata masyarakat dunia terhadap ketidakadilan yang mungkin terjadi di Qatar dalam mengatasi pelanggaran HAM yang ada Qatar (Amnesty Internasional 2016).

### **1. Advokasi dan Lobi**

Dalam teori NGOs, advokasi & lobi merupakan peran utama politik NGO. Advokasi & lobi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk mempromosikan perubahan sosial, kebijakan, atau hukum berkontribusi dalam lingkungan masyarakat. Dalam melakukan advokasi, NGO berperan aktif memberi suara kepada mereka yang tidak mampu bersuara serta mendesak terjadinya perubahan yang berkelanjutan di beragam sektor seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan kesehatan. NGO berupaya memajukan hak-hak masyarakat melalui berbagai upaya advokasi kepada para pembuat kebijakan. Laporan dalam bentuk Advokasi diarahkan untuk mencapai perubahan kebijakan atau tindakan spesifik dari pemerintah atau organisasi internasional. Isi laporan sering kali bersifat mendalam, memberikan strategi atau argumen yang langsung terkait dengan pembuat kebijakan. Laporan ini cenderung disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengambil

keputusan dan sering kali bertujuan untuk mendapatkan dukungan moral atau material untuk memperkuat posisi atau aksi dari pihak yang lebih kuat (Ahmed & Potter 2006).

Sebagai Peran Amnesty Internasional dalam pengawalan advokasi pekerja migran di Qatar, Amnesty International berperan sebagai pengungkapan pelanggaran HAM mengidentifikasi dan mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh pekerja migran, termasuk kondisi kerja yang tidak aman dan praktik kerja paksa. Mereka mengumpulkan bukti dan testimoni dari pekerja untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi yang dihadapi. meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran global tentang isu-isu yang dihadapi oleh pekerja migran di Qatar. Mendorong advokasi dalam reformasi hukum, telah mengumpulkan dan mencatat informasi tentang kondisi kerja pekerja imigran di Qatar, termasuk di sektor keamanan dalam fasilitas Piala Dunia. Amnesty Internasional bekerja dalam misi mensejahterakan pekerja imigran untuk memperoleh perlakuan yang adil dan adil (Amnesty Internasional 2016).

Dalam hal ini, Amnesty International memanfaatkan posisi strategisnya di sebagai NGO dalam mengadvokasi. Amnesty Internasional memahami bahwa dalam era globalisasi, tekanan internasional dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendorong perubahan kebijakan di negara-negara yang bergantung pada citra internasional mereka. Qatar, sebagai negara yang sedang berada di bawah sorotan dunia karena menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, menjadi target utama dari advokasi Amnesty International. Dengan melakukan advokasi, Amnesty Internasional berharap pemerintah Qatar akan mengubah kebijakan dan sistem *Kafala* untuk memberi pekerja imigran lingkungan kerja yang lebih adil dan

manusiawi. Dengan menggunakan data dan hasil riset, mereka tidak hanya mengekspos pelanggaran dan ketidaksetaraan hak, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk mendorong pemerintah dan lembaga internasional untuk melindungi hak-hak pekerja (Amnesty Internasional 2022).

Salah satu alat utama yang digunakan Amnesty International dalam advokasinya adalah publikasi laporan-laporan yang mendokumentasikan pelanggaran HAM. Pada tahun 2013, Amnesty International merilis sebuah laporan penting berjudul "*The Dark Side of Migration: Spotlight on Qatar's Construction Sector Ahead of the World Cup*". Laporan ini merupakan hasil dari investigasi mendalam yang dilakukan di lapangan, yang mengungkapkan berbagai kondisi kerja yang sangat buruk dan tidak manusiawi yang dialami oleh pekerja migran di Qatar (Amnesty Internasional 2013).

Laporan tersebut mengungkap bahwa banyak pekerja migran di sektor konstruksi yang mengalami eksploitasi serius, seperti upah yang tidak dibayar, kondisi kerja yang tidak aman, serta perlakuan diskriminatif berdasarkan kebangsaan dan status sosial. Selain itu, laporan ini juga menyoroti bagaimana pekerja migran sering kali dipaksa bekerja dalam kondisi cuaca yang ekstrem tanpa akses yang memadai ke layanan kesehatan dan keselamatan kerja. Kondisi-kondisi ini, menurut laporan tersebut, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan internasional (Amnesty Internasional 2013).

Laporan "*The Dark Side of Migration*" juga berhasil menarik perhatian media internasional, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil di berbagai negara. Melalui publikasi ini, Amnesty International secara efektif mengangkat isu pelanggaran HAM di Qatar ke panggung internasional, yang pada akhirnya

menekan pemerintah Qatar untuk melakukan reformasi. Laporan ini juga berfungsi sebagai dasar bagi Amnesty International dalam menyusun strategi advokasi berikutnya, termasuk upaya untuk mendorong perubahan dalam sistem hukum dan kebijakan ketenagakerjaan di Qatar (Amnesty Internasional 2013).

Dalam hal ini, Amnesty Internasional memiliki komitmen kuat untuk memiliki merespon dan menyoroti pemerintah Qatar sebagai pelaku dalam pelanggaran HAM ini dala Amnesty Internasional juga mengidentifikasi berbagai masalah lain yang dihadapi oleh pekerja migran, termasuk kondisi tempat tinggal yang tidak layak dan minimnya akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Laporan-laporan ini menekankan pentingnya bagi pemerintah Qatar untuk segera memperbaiki kondisi-kondisi tersebut demi melindungi hak-hak sosial dan ekonomi pekerja migran. Misalnya, laporan "*All Work, No Pay: The Struggle of Qatar's Migrant Workers for Justice*" (Amnesty Internasional 2021) Menunjukkan bahwa ribuan pekerja migran hidup dalam kondisi tempat tinggal yang tidak higienis dan penuh sesak, yang jauh dari standar internasional (Amnesty Internasional 2021).

Sistem *kafala* ini dianggap sebagai akar dari banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Qatar. Amnesty Internasional dalam berbagai laporannya, seperti "*Reality Check 2021: A Year to the 2022 World Cup*" (Amnesty Internasional 2021). Menekankan bahwa, pekerja migran sering kali dipaksa bekerja dalam kondisi yang keras tanpa upah yang layak, bahkan sering kali tanpa upah sama sekali selama berbulan-bulan. Amnesty Internasional mendesak pemerintah Qatar untuk menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan adil, serta

menghapuskan praktik-praktik diskriminatif yang memperburuk kondisi pekerja migran (Amnesty Internasional 2021).

Amnesty International meminta reformasi sistem *kafala* Qatar untuk menghasilkan perubahan besar dalam perlindungan hak asasi manusia. Mereka menekankan bahwa tindakan konkret harus diambil oleh Qatar untuk mengakhiri sistem *kafala* dengan menghapus dasar praktik yang mengekang. Hasil dari reformasi sistem *kafala*. Reformasi sistem *kafala* mencakup Reformasi sistem *kafala* juga mencakup penerapan sistem pengelolaan konflik. Pemerintah Qatar telah membuat sistem pengelolaan konflik untuk membantu pekerja migran mengatasi masalah yang mungkin mereka hadapi selama tinggal dan bekerja di negara tersebut. Sistem ini dibuat untuk meningkatkan hubungan antara pekerja migran dan pihak-pihak terkait serta memastikan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan cara yang efektif dan adil.

Secara keseluruhan, pemerintah Qatar melakukan reformasi sistem *kafala* untuk menunjukkan komitmen mereka untuk meningkatkan kondisi kerja dan melindungi hak asasi pekerja migran. Langkah-langkah ini diharapkan akan berdampak positif pada perlakuan dan kesejahteraan pekerja migran di Qatar (U.S. Department of State 2022).

Namun, pada peran lobi. Amnesty Internasional tidak melakukan melobi secara langsung kepada pemerintah Qatar. Hanya melakukan advokasi yang mengkritik dan menyerukan untuk mereformasi sistem *kafala*. Banyaknya kritikan yang ditujukan terhadap pemerintah Qatar membuat pemerintah Qatar mengambil langkah dalam mengatasi pelanggaran HAM terhadap para pekerja imigran.

## **2. Pendidikan Publik dan Peningkatan Kesadaran**

Sesuai dengan teori NGOs pada peran politik, Pendidikan publik dan peningkatan kesadaran adalah dua kegiatan yang terkait erat dalam peran politik NGO. NGO memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu tertentu dan mempromosikan perubahan kebijakan. menggunakan informasi untuk mengedukasi dan memengaruhi pemerintah, lembaga, serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Tujuan NGO dalam peran sebagai pendidikan publik dan peningkatan kesadaran ini adalah memberikan argumen untuk mendukung perubahan kebijakan dan mendorong kesadaran akan isu-isu global (Ahmed & Potter 2006).

Berdasarkan peran dari Amnesty Internasional yaitu, mengkritik, memperjuangkan dan menyelidiki pelanggaran HAM secara mendalam yang ada di seluruh dunia. Amnesty bergerak melalui berbagai riset ke lapangan dan melakukan analisis secara mendalam dengan bukti-bukti kuat dari pelanggaran HAM di seluruh dunia dan kemudian di bikin laporan secara objektif tentang pelanggaran HAM dalam suatu wilayah tertentu. Fungsi Amnesty Internasional ini juga memberikan pemahaman terhadap masyarakat internasional tentang pentingnya edukasi tentang HAM (Deutsche Welle 2022).

Sesuai teori NGOs, Amnesty Internsional menggunakan laporan-laporannya untuk mengedukasi masyarakat global tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Qatar. Amnesty International secara aktif melibatkan media internasional dan publik dalam kampanye-kampanye kesadaran untuk menarik perhatian dunia terhadap isu-isu HAM di Qatar. Dengan menggunakan platform media sosial

seperti *Facebook*, *Twitter (X)*, *Instagram* yang dimana sebagai kampanye sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat internasional:

### I. Facebook:

Amnesty Internasional merilis video berisi tentang edukasi ke masyarakat tentang kasus Pelanggaran HAM di Qatar yang berjudul “*Investigating the Truth Qatar 2020 FIFA World Cup & Human Right Abuses*” yang dirilis tahun 2021.

### Gambar 3.1 Amnesty Internasional Menggunakan Platform Media Sosial Facebook untuk Memberikan Informasi tentang Pelanggaran HAM di Qatar

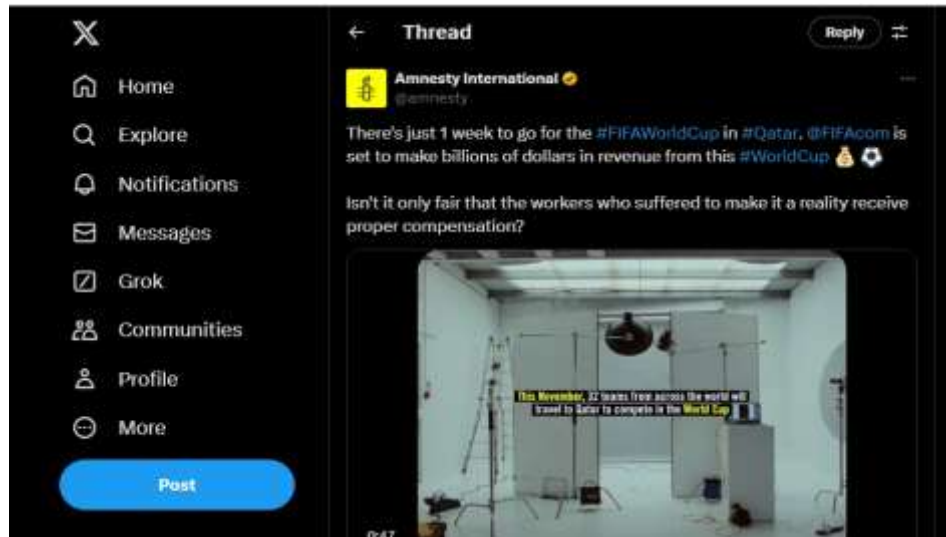


Sumber : Amnesty International, Facebook (2021)

### II. Twitter (X):

Amnesty Internasional memberikan edukasi ke melalui platform Twitter (X) yang dirilis dalam bentuk video berdurasi 51 detik yang berisikan kampanye dalam menyerukan bahwa pemerintah Qatar dan FIFA untuk tanggung jawab dalam isu pelanggaran HAM di Qatar. Amnesty Internasional merilis video tersebut di tanggal 14 November 2022 atau 5 hari sebelum pergelaran *event* Piala Dunia 2022 dimulai yang berjudul “*Pay Up FIFA*”.

**Gambar 3.2 Amnesty Internasional Menggunakan Platform Media Sosial Twitter (X) untuk Memberikan Informasi tentang Pelanggaran HAM di Qatar**

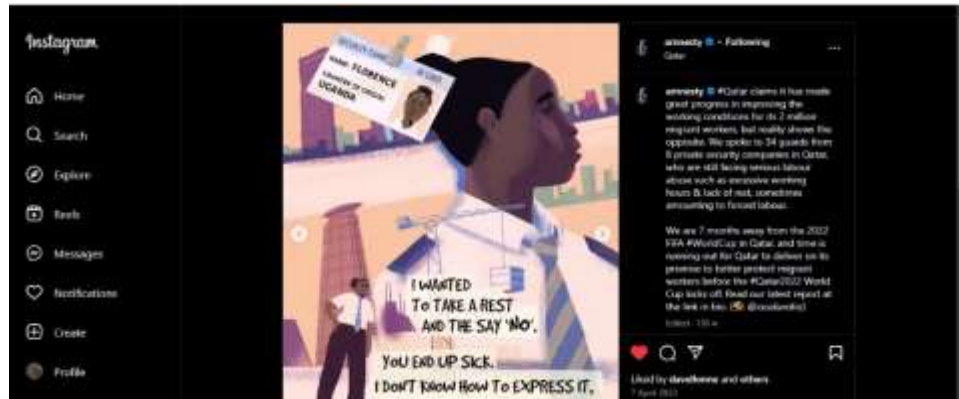


Sumber : Amnesty International, Twitter (X) (2022)

III. Instagram:

Amnesty Internasional juga memberikan edukasi terhadap masyarakat global sebagai respon nya dari pelanggaran HAM di platform Instagram yang dirilis dalam bentuk 5 video dalam 1 post yang berisi tentang kritiknya terhadap pemerintah Qatar yang memberlakukan para pekerja imigran dengan buruk.

**Gambar 3.3 Amnesty Internasional Menggunakan Platform Media Sosial Instagram untuk Memberikan Informasi tentang Pelanggaran HAM di Qatar**



Sumber : Amnesty International, Instagram (2021)

Melalui kampanye pendidikan dan kesadaran ini, Amnesty Internasional menjalankan fungsinya untuk meningkatkan tekanan internasional terhadap Qatar, mendesak pemerintah Qatar dan mendorong pemerintah Qatar untuk mengambil tindakan yang lebih serius dalam menangani pelanggaran HAM.

### **3. Penetapan Agenda**

NGO menetapkan agenda politik, memperkenalkan isu-isu baru, dan mendorong pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan. NGO juga terlibat dalam menyediakan riset dan solusi bagi permasalahan lintas batas seperti polusi dan perdagangan, serta berperan penting dalam konferensi internasional atau memantau perjanjian global. NGO ikut mempromosikan isu-isu tertentu ke dalam agenda politik. NGO melakukan penetapan agenda untuk mempromosikan kepentingan masyarakat dan memengaruhi kebijakan pemerintah atau organisasi internasional (Ahmed & Potter 2006).

Sebagai NGO, Amnesty Internasional mengatur dalam agendanya sebagai NGO yang bergerak dalam merespon pelanggaran HAM. Amnesty Internasional melakukan riset dengan melakukan wawancara terhadap para pekerja imigran yang menjadi korban dan mencatat pengalaman pribadi mereka, serta menganalisis kebijakan dan praktik yang memperburuk kondisi kerja mereka selama persiapan Piala Dunia dari tahun 2013 hingga tahun 2022. Selama pengumpulan data tersebut, Amnesty International mewawancarai pekerja imigran dan mencatat pengalaman pribadi mereka, serta menganalisis kebijakan dan praktik yang memperburuk kondisi kerja mereka. Laporan-laporan dalam penetapan agenda berfokus pada mengangkat isu-isu tertentu agar diakui oleh publik dan pemerintah sebagai masalah yang membutuhkan perhatian. Dalam hal ini, laporan dalam penetapan agenda lebih menonjolkan informasi edukatif, statistik yang mudah diakses, serta narasi yang dapat memperjelas mengapa suatu isu perlu menjadi prioritas kebijakan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran, mendefinisikan masalah, dan membingkai isu agar dapat dipahami dan diterima oleh para pembuat kebijakan serta masyarakat luas (Ahmed & Potter 2006).

Laporan ini memberikan suara bagi mereka yang seringkali tidak memiliki platform di mana mereka dapat menyuarakan penderitaan mereka. Fokus pada sektor keamanan pribadi dalam persiapan Piala Dunia juga terlihat dalam laporan Amnesty Internasional. Sebagai bentuk paksa kerja, jam kerja yang berlebihan, kurangnya hari libur, sanksi finansial sewenang-wenang, dan pembayaran lembur yang tidak sesuai adalah beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang didokumentasikan oleh pekerja di sektor ini. Ini menjadi perhatian penting untuk

menunjukkan bahwa tidak hanya pekerja imigran pada umumnya yang terkena dampak, tetapi juga pekerja di beberapa industri (Amnesty Internasional 2022).

Dengan jutaan pekerja migran yang datang dari berbagai negara, terutama dari Asia Selatan, seperti Bangladesh, Nepal, dan India, untuk membangun infrastruktur yang diperlukan, Qatar menghadapi tekanan internasional terkait perlakuan terhadap pekerja-pekerja ini. Amnesty Internasional menyoroti bagaimana kondisi sosial dan ekonomi pekerja migran ini sering kali diabaikan dalam proses pembangunan. Amnesty Internasional berperan signifikan dalam mengawasi dan melaporkan kondisi ekonomi dan sosial pekerja migran di Qatar, terutama selama persiapan Piala Dunia 2022 (Amnesty Internasional 2021).

Melalui riset lapangan, analisis mendalam, dan pengumpulan bukti yang akurat. Laporan-laporan ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang situasi, tetapi juga membuka mata masyarakat dunia terhadap ketidakadilan yang mungkin terjadi di Qatar dalam mengatasi pelanggaran HAM yang ada Qatar (Amnesty Internasional 2016).

**Tabel 3.1. Laporan Amnesty Internasional dalam mengkritik pemerintah Qatar dari tahun 2013 hingga tahun 2022**

No	Judul Laporan	Tahun Terbit
1	<i>Qatar: Amnesty International Launch of Report Placing the Spotlight on Qatar's Construction Sector Ahead of the World Cup</i>	2013
2	<i>The Dark Side of Migration: Spotlight on Qatar's Construction Sector Ahead of the World Cup</i>	2013

3	<i>No Extra Time: How Qatar is Still Failing on Workers' Rights Ahead of the World Cup</i>	2014
4	<i>Promising Little, Delivering Less: Qatar and Migrant Labour Abuse Ahead of the 2022 Football World Cup</i>	2015
5	<i>The Ugly Side of the Beautiful Game: Exploitation of Migrant Workers on Qatar's World Cup Construction Sites</i>	2016
6	<i>Qatar: New Name, Old System? Qatar's New Employment Reforms</i>	2016
7	<i>Qatar: "My Sleep is My Break": Exploitation of Migrant Domestic Workers in Qatar</i>	2017
8	<i>Qatar: Reality Check: The State of Migrant Workers' Rights with Four Years to Go Until the Qatar 2022 World Cup</i>	2018
9	<i>All Work, No Pay: The Struggle of Qatar's Migrant Workers for Justice</i>	2019
10	<i>Unpaid and Abandoned: The Abuse of Mercury MENA Workers</i>	2019
11	<i>Reality Check 2020: Countdown to the Qatar 2022 World Cup – Migrant Workers' Rights in Focus</i>	2020
12	<i>Qatar: "In the Prime of Their Lives": Qatar's Failure to Investigate, Remedy and Prevent Migrant Workers' Deaths</i>	2021
13	<i>Reality Check 2021: A Year to the 2022 World Cup</i>	2021

14	<i>Unfinished Business: What Qatar Must Do to Fulfil Promises on Migrant Workers' Rights</i>	2022
15	<i>Qatar: Predictable and Preventable: Why Qatar's World Cup 'Heat-Stress' Deaths Are a Scandal</i>	2022
16	<i>Qatar: 2022 World Cup of Shame: Labour Rights Abuses on the Road to Doha</i>	2022
17	<i>Qatar: The Ugly Truth Behind the World Cup: Migrant Workers Still Trapped in Labour Exploitation</i>	2022
18	<i>Qatar: "They Think We're Machines": Qatar's Construction Workers Speak Out</i>	2022
19	<i>All Work and No Pay: The Struggle of Qatar's Migrant Workers</i>	2022
20	<i>Reality Check: FIFA World Cup 2022 – Amnesty International Report on Migrant Worker Rights</i>	2022

Sumber: Amnesty International (2013), (2014), (2015), (2016), (2017), (2018), (2019), (2020), (2021), (2022).

Karena itu, NGO yang terakhir yaitu menjadikan masalah pelanggaran HAM sebagai objek dalam penelitian yang bertujuan tidak hanya berkontribusi terhadap merespon pelanggaran HAM tetapi juga buat penelitian untuk kedepannya (Amnesty Internasional 2022).

#### **4. Pemantauan Aktor Transnasional Lainnya**

NGO berperan berperan penting dalam memantau kepatuhan negara terhadap hukum dan perjanjian internasional, serta memastikan akuntabilitas di

tingkat global. Isu global yang menuntut pengawasan bersama, sehingga hukum dunia mampu dijaga dan kesetaraan dipertahankan (Ahmed & Potter 2006).

Peran Amnesty Internasional sebagai aktor yang memantau pemerintah Qatar dimulai sejak tahun 2013 yang dimana menjadi laporan pelanggaran HAM pertama yang diterbitkan pada persiapan Piala Dunia 2022 yang dibuat oleh Amnesty Internasional hingga tahun 2022 yang dimananya tahun tersebut menjadi tahun yang diselenggarakan Piala Dunia oleh FIFA dan Qatar sebagai tuan rumah.

Amnesty International mencatat sejumlah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Qatar selama persiapan Piala Dunia 2022 seperti pelanggaran HAM bentuk gaji, pelanggaran HAM pada tempat tinggal, pelanggaran HAM dalam bentuk diskriminasi berbasis gender, ras dan bangsa dan dan pelanggaran HAM dalam bentuk keselamatan yang dimana pemerintah Qatar melanggar beberapa perjanjian internasional yaitu:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), 1948  
= DUHAM melarang perbudakan dan praktik eksploitasi, termasuk hak atas pekerjaan yang aman dan adil (Hapsari 2022).
2. Konvensi ILO No. 87 dan No. 98 tentang Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama, 1948-1949. (Amnesty International 2022)  
= Qatar tidak memberikan izin bagi pekerja migran untuk berserikat atau melakukan negosiasi upah yang adil, sehingga melanggar konvensi ini.
3. Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), 1979.

= Qatar juga melanggar CEDAW dengan memberlakukan kebijakan diskriminatif terhadap pekerja perempuan, terutama dari negara-negara Asia Selatan (Amnesty International 2022)

4. Kovensi PBB, 1990.

= Meskipun Qatar tidak meratifikasi konvensi ini, banyak negara dan organisasi HAM menyatakan bahwa tindakan Qatar bertentangan dengan prinsip konvensi tersebut, yang melindungi hak-hak pekerja migran (Prakarsa 2018).

Perjanjian ini mendesak Qatar untuk memperbaiki sistem kesehatan dan jaminan sosial bagi pekerja migran, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi mereka yang menghadapi pelanggaran (Amnesty Internasional 2019).

Dalam hal ini, Amnesty Internasional menyoroti pemerintahan Qatar dalam memberlakukan sistem *Kafala*. Sistem yang menjadi penyebab perbudakan modern karena memberikan kendali yang hampir penuh kepada majikan atas pekerja migran. Dalam sistem ini, pekerja tidak bisa berpindah kerja atau meninggalkan negara tersebut tanpa izin dari majikan mereka, yang sering kali menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh majikan. Amnesty International telah secara konsisten mengadvokasi penghapusan atau setidaknya reformasi mendalam terhadap sistem *kafala* di Qatar. Dalam berbagai laporan dan kampanye advokasinya, Amnesty menyoroti bagaimana sistem *kafala* memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM yang sistematis terhadap pekerja migran. Amnesty juga menekankan bahwa tanpa reformasi sistemik terhadap *kafala*, pekerja migran di Qatar akan terus berada dalam kondisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi (Amnesty Internasional 2016).

Sebagai hasil dari tekanan yang terus menerus dari Amnesty Internasional dan organisasi HAM lainnya, pemerintah Qatar merespon tekanan tersebut, salah satunya adalah merespon laporan yang berjudul “*New Name, Old System?*” yang diterbitkan oleh Amnesty Internasional tahun 2016. Pemerintah Qatar menolak klaim bahwa Undang-Undang nomor 21 tahun 2015 tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi para pekerja imigran. Pemerintah Qatar menegaskan komitmennya untuk mengembangkan sistem ketenagakerjaan yang adil bagi semua pihak, baik pengusaha maupun pekerja (Government Communications Office of the State of Qatar 2016).

Kemudian, pemerintah Qatar menghapus sistem *kafala* dimulai dari tahun 2020 yang dimana pemerintah Qatar mengumumkan penghapusan sistem *kafala* dan memperkenalkan reformasi ketenagakerjaan yang lebih progresif, termasuk pemberlakuan upah minimum nasional untuk pertama kalinya dan penghapusan persyaratan izin dari majikan untuk berpindah kerja. Meskipun ini merupakan perkembangan yang positif, Amnesty Internasional tetap waspada dan terus memantau implementasi reformasi ini. Amnesty berpendapat bahwa meskipun reformasi di atas kertas sudah dilakukan, tantangan nyata adalah memastikan bahwa reformasi tersebut benar-benar diterapkan secara efektif di lapangan (Amnesty Internasional 2020).

## **5. Penetapan Agenda dalam Arena Pengambilan Keputusan Global**

Penetapan agenda adalah langkah penting dalam proses kebijakan global yang melibatkan berbagai aktor, termasuk negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan NGO. Dalam konteks hubungan internasional,

agenda mengacu pada upaya mengangkat isu-isu tertentu agar menjadi perhatian para pembuat kebijakan di tingkat internasional. NGO memiliki peran yang signifikan dalam proses ini, terutama karena mereka sering kali bertindak sebagai penggerak utama dalam memperkenalkan, mempromosikan, dan menyebarkan isu-isu yang mereka anggap penting (Ahmed & Potter 2006).

Dalam konteks penetapan agenda dalam pengambilan keputusan global, NGO seperti Amnesty International memainkan peran penting dalam memengaruhi kebijakan internasional. NGO berpartisipasi aktif dalam menetapkan isu-isu penting agar menjadi perhatian para pembuat kebijakan di tingkat global. NGO ini, bekerja sama dengan aktor lain seperti negara dan organisasi internasional, menggunakan peran advokasi, lobi, pendidikan publik, serta peningkatan kesadaran untuk memengaruhi kebijakan yang terkait hak asasi manusia (HAM) dan isu-isu kemanusiaan lainnya. Dalam hal ini, Amnesty International bekerja sama dengan berbagai lembaga non-pemerintah (NGO) lain untuk mendukung dan melindungi HAM. Ini mereka capai melalui berbagai aksi seperti melakukan penelitian, mendukung orang lain, dan melakukan kampanye untuk hak-hak yang terancam (Amnesty Internasional 2022).

Amnesty Internasional berfokus dalam menjadi peran untuk upaya merespon pelanggaran HAM yang terjadi di Qatar dalam persiapan Piala Dunia 2022. Namun, dalam merespon pelanggaran HAM tersebut, Amnesty Internasional tidak hanya bekerja sendiri tetapi dibantu dengan lembaga-lembaga NGO lainnya. Sejumlah NGO yang bergerak juga dalam masalah HAM bekerjasama dengan Amnesty Internasional dalam mengatasi pelanggaran HAM di Qatar ini. Lembaga tersebut yaitu:

- *Human Right Watch*
- *Fair Square*
- *A Global Coalition of Migrant Rights Groups*
- *Sport & Right Alliance (SRA)*
- *International Labour Organization (ILO)*

Amnesty Internasional, bersama lembaga NGO lain dan koalisi seperti *Human Rights Watch, FairSquare, Equidem, ILO dan Sport & Rights Alliance (SRA)*, telah memainkan peran penting dalam merespon pelanggaran HAM yang terjadi selama persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar. Melalui kerjasama yang erat, mereka telah menekankan pentingnya kepatuhan FIFA dalam menangani pelanggaran HAM terhadap pekerja imigran, kesejahteraan anak-anak, hak pekerja, perlindungan, dan anti-korupsi. Upaya ini tidak hanya berfokus pada mengkritisi pelanggaran HAM, tetapi juga menggalang tindakan konkret dari FIFA dan pemerintah Qatar. Amnesty Internasional dan koalisi lainnya menyoroti pentingnya penggunaan *Dana Legacy* untuk mengkompensasi pekerja dan keluarga mereka yang mengalami kekerasan, cedera, dan pencurian gaji selama persiapan Piala Dunia. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik yang merugikan pekerja imigran juga ditekankan dalam upaya ini. Dapat dikatakan, dukungan internasional, tuntutan penggunaan dana kompensasi, kampanye advokasi, dan pengawasan terhadap kepatuhan FIFA, Amnesty Internasional dan lembaga lain berupaya untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi selama persiapan Piala Dunia di Qatar mendapatkan dukungan dan perhatian yang luas. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dan memberikan keadilan bagi para

pekerja imigran yang terkena dampak pelanggaran HAM (Business & Human Rights Resource Centre 2022).

Amnesty Internasional dan koalisi lainnya menekankan pentingnya FIFA mengambil langkah nyata untuk mengatasi pelanggaran HAM ini, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik yang merugikan pekerja imigran. Selain itu, Amnesty Internasional juga berperan aktif dalam pengawasan dan advokasi terhadap FIFA. Mereka menekankan bahwa FIFA harus mematuhi kebijakan hak asasi manusia mereka sendiri dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi selama persiapan Piala Dunia di Qatar (Amnesty Internasional 2016).

Melalui kerjasama yang erat antara Amnesty Internasional, lembaga NGO lain, dan koalisi seperti SRA, upaya mengatasi pelanggaran HAM di Qatar mendapatkan dukungan dan perhatian yang luas. Kampanye-kampanye advokasi, penggalangan dukungan internasional, tuntutan penggunaan dana kompensasi, dan pengawasan terhadap kepatuhan FIFA menjadi bagian integral dari strategi untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dipenuhi dalam konteks persiapan Piala Dunia. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dan memberikan keadilan bagi para pekerja imigran yang terkena dampak pelanggaran HAM (Amnesty Internasional 2022).

Kerjasama tersebut bertujuan tidak hanya mengkritisi Qatar dalam masalah pelanggaran HAM yang terjadi tetapi juga mengkritik tindakan kepada FIFA dan pemerintah Qatar yang dianggap membiarkan terjadinya pelanggaran HAM di Qatar ini sehingga Amnesty Internasional dan lembaga NGO lain ikut mengkritik isu-isu pelanggaran HAM di Qatar yang dimana yang menjadi korban iyalah para

pekerja imigran. Bentuk kerjasama Amnesty Internasional dengan lembaga NGO lain yaitu, Amnesty Internasional, *A Global Coalition of Migrant Rights Groups*, *Fair Square* dan *Human Right Watch* bekerjasama dalam mengulik pelanggaran HAM apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Qatar. Kerjasama tersebut berupa Memaksa pemerintah Qatar dan FIFA untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi senilai \$440 juta dollar atau sekitar 7,115 triliun rupiah terhadap kasus pelanggaran HAM kepada pekerja imigran yang dimana kasus tersebut dalam bentuk kematian para korban dan diskriminasi dalam bentuk gaji. Selain itu, Melakukan kampanye ke seluruh dunia dalam bentuk kampanye dengan *hashtag #PayUpFIFA* yang dirintis pertama kali oleh *Human Right Watch* yang di ikuti juga oleh Amnesty Internasional yang merilis laporan dalam "*Predictable and Preventable*" yang berisi apa yang harus dilakukan oleh FIFA dan pemerintah Qatar dalam mengatasi pelanggaran selama 12 tahun terakhir (Human Right Watch 2022).

Selain itu, Kerjasama dengan *Sport & Rights Alliance (SRA)* juga menjadi bagian integral dari upaya mengatasi pelanggaran HAM di Qatar. SRA merupakan koalisi global yang terdiri dari NGO dan sindikat pekerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa badan olahraga, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya mematuhi standar internasional terkait HAM, hak pekerja, dan perlindungan. Di dalam SRA, terdapat berbagai organisasi yang berperan penting dalam advokasi dan penggalangan dukungan, seperti *The Army of Survivors*, *Committee to Protect Journalists*, *Football Supporters Europe*, *Human Rights Watch*, *ILGA World*, *International Trade Union Confederation*, dan *World Players Association*, *UNI Global Union* (Amnesty Internasional 2022).

Namun, peran dalam arena pengambilan keputusan global, Amnesty International tidak membuat perjanjian internasional. tetapi, Amnesty Internasional berpengaruh yang signifikan dalam arena keputusan global melalui perannya dalam advokasi & lobi, penetapan agenda, pemantauan aktor transnasional dan penetapan agend. Amnesty bertindak sebagai pengawas independen yang mendokumentasikan pelanggaran HAM dan memberi tekanan pada negara-negara dan organisasi internasional untuk bertindak sesuai dengan standar HAM yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.

Karena itu, dalam peran *relief* dari teori NGOs ini. Amnesty Internasional tidak melakukan peran *relief* dalam merespon pelanggaran HAM di Qatar, Amnesty Internasional hanya melakukan peran nya sebagai NGO itu murni sebagai lembaga yang memberikan bantuan advokasi dalam bentuk membuat laporan, membuat kampanye ke seluruh dunia dan mengkritik pemerintah Qatar, melakukan wawancara kepada korban pelanggaran HAM, membuat laporan pelanggaran HAM dan mengkampanyekan masalah pelanggaran HAM yang ada di Qatar dalam persiapan Piala Dunia 2022.

Dalam hal ini, peran ekonomi & sosial dari NGOs dari Shamima Ahmed dan David M.Potter. Amnesty Internasional juga tidak memberikan bantuan dalam bentuk ekonomi maupun pembangunan sosial dalam respon nya dalam masalah pelanggaran HAM di Qatar. Amnesty Internasional hanya sebagai lembaga NGO yang merespon dalam masalah pelanggaran HAM yang ada di Qatar dalam bentuk bantuan seperti melalui wawancara, membuat laporan dan mengadvokasi suatu masalah pelanggaran HAM pelanggaran HAM di Qatar dalam persiapan Piala Dunia 2022.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan skripsi yang saya analisis, skripsi ini menjelaskan bahwa adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Qatar dalam persiapan Piala Dunia tahun 2022 yang membuat Amnesty Internasional turun tangan dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh beberapa faktor. Faktor yang menyebabkan Amnesty Internasional ini turun tangan dalam merespon pelanggaran HAM di dalam penelitian ini menggunakan teori NGOs dari Shamima Ahmed & David M. Potter menjelaskan apa saja yang dilakukan NGO sehingga Amnesty Internasional termasuk ke dalam lembaga NGO (Ahmed & Potter 2006).

**Tabel 4.1. Aplikasi Teori**

NO	Teori NGOs	Implementasi
1	Relief	Tidak ada dalam peran Amnesty Internasional
2	Peran Ekonomi & Sosial	Tidak ada dalam peran Amnesty Internasional
3	Peran Politik NGO: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi and Lobi</li> <li>2. Pendidikan Publik dan Peningkatan Kesadaran</li> <li>3. Pengaturan Agenda</li> <li>4. Pemantauan Aktor Transnasional Lainnya</li> <li>5. Penetapan Agenda dalam Arena Pengambilan Keputusan Global</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amnesty Internasional menggunakan laporan dan riset dalam mengadvokasi untuk respon pelanggaran HAM di Qatar. Tetapi secara lobi langsung tidak ada</li> <li>2. Amnesty Internasional menyampaikan argumen untuk mendukung</li> </ol>

		<p>perubahan kebijakan dan mendorong kesadaran akan isu-isu global.</p> <p>3. Amnesty Internasional merilis laporan dan dokumentasikan pelanggaran HAM di Qatar.</p> <p>4. Amnesty menjadi pengawas pelanggaran HAM dan menjalankan peran nya sebagai NGO</p> <p>5. Amnesty Internasional bekerja sama dengan NGO lain dalam mengatasi pelanggaran HAM</p>
--	--	--

Teori yang ditemukan oleh Shamima Ahmed & David M. Potter ini menjelaskan ada beberapa faktor dari peran Amnesty Internasional yang sesuai dengan teori NGOs dalam mengatasi pelanggaran HAM di Qatar saat persiapan Piala Dunia 2013-2022.

Faktor pertama, Amnesty Internasional menjalankan teori NGO yang dimana Amnesty Internasional tidak berperan secara *relief*. Dalam hal ini, Amnesty Internasional hanya melakukan pengawasan terhadap pelanggaran HAM melalui riset lapangan dan wawancara terhadap para pekerja imigran yang menjadi korban dari pelanggaran HAM yang konsisten dari tahun 2013 hingga tahun 2022.

Faktor kedua, Amnesty Internasional menjalankan teori NGOs yang dimana berperan dalam tidak berperan juga dalam dalam berperan ekonomi & sosial. Amnesty Internasional memfokuskan dalam mengkritik keras dan memaksa

pemerintah Qatar untuk bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di Qatar.

Faktor ketiga, Amnesty Internasional menjalankan peran politik dalam upaya merespon pelanggaran HAM di Qatar, terutama terkait dengan pekerja migran. Amnesty Internasional berperan politik melalui advokasi yang konsisten, memberikan pendidikan sebagai kesadaran ke seluruh dunia, menetapkan agenda laporan, memantau aktor yang dimana Amnesty sebagai aktor yang menyoroti Qatar dan menetapkan agenda melalui kerjasama dengan NGO lain.

Dalam 3 faktor ini, Amnesty Internasional telah merespon pelanggaran HAM di Qatar melalui peran politik berdasarkan implementasi teori NGOs dari Shamima Ahmed dan David M. Potter. Pemerintah Qatar dan FIFA bertanggung jawab dalam merespon pelanggaran HAM. Peran Amnesty Internasional penting yang dimulai kasus tersebut dibuka dari tahun 2013 hingga 2022. Selain itu, Amnesty Internasional juga bertujuan untuk membuat pergelaran Piala Dunia 2022 ini menjadi jauh lebih baik dengan diselesaikannya kasus pelanggaran HAM di Qatar ini.

#### **4.2 Rekomendasi**

Untuk rekomendasi penelitian selanjutnya, peneliti bisa melakukan penelitian tentang kasus pelanggaran HAM yang serupa dalam melindungi para imigran-imigran yang menjadi korban. Dampak dari analisis untuk kedepannya juga bisa diambil dari dampak kasus pelanggaran HAM di Qatar tahun 2013-2022 yang merupakan upaya dari lembaga lain selain dari Amnesty Internasional. Penelitian ini bisa memberikan wawasan dan materi yang mendalam terhadap

upaya merespon pelanggaran HAM di tingkat Internasional dan dampak dari pelanggaran HAM khususnya bagi negara Qatar dalam persiapan *event* Piala Dunia 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Tribun News. (2022). "Pelanggaran yang Dilakukan Qatar: Tahan Gaji Pekerja, Tak Bayar Kompensasi hingga Deportasi Migran." Diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2022/08/25/pelanggaran-yang-dilakukan-qatar-tahan-gaji-pekerja-tak-bayar-kompensasi-hingga-deportasi-migran>
- Ahmed, S., & Potter, D. M. (2006). "NGOs in International Politics." Kumarian Press.
- Amnesty International. (2013). "The Ugly Side of the Beautiful Game: Exploitation of Migrant Workers on a Qatar 2022 World Cup."
- Amnesty International. (2013). "The Dark Side of Migration: Spotlight on Qatar's Construction Sector Ahead of the World Cup." Amnesty International.
- Amnesty International. (2013). "Qatar: End corporate exploitation of migrant construction workers." <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/11/qatar-end-corporate-exploitation-migrant-construction-workers-2/>: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/11/qatar-end-corporate-exploitation-migrant-construction-workers-2/>
- Amnesty International. (2014). No Extra Time: How Qatar is Still Failing on Workers' Rights Ahead of the World Cup.
- Amnesty International. (2015). *Promising Little, Delivering Less: Qatar and Migrant Labour Abuse Ahead of the 2022 Football World Cup.*
- Amnesty International. (2016). Qatar: New Name, Old System? Qatar's New Employment Reforms.
- Amnesty International. (2016). The Ugly Side of the Beautiful Game: Exploitation of Migrant Workers on Qatar's World Cup Construction Sites.
- Amnesty International. (2016). "Qatar: Reality Check-Countering Abuses of Migrant Workers Ahead of the 2022 FIFA World Cup." Site.1-80.
- Amnesty International. (2016). "Qatar World Cup of Shame." Retrieved from AmnestyInternational:<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/03/Qatar-work-cup-of-shame/>
- Amnesty International. (2017). Qatar: "My Sleep is My Break": Exploitation of Migrant Domestic Workers in Qatar.
- Amnesty International. (2018). Qatar: Reality Check: The State of Migrant Workers' Rights with Four Years to Go Until the Qatar 2022 World Cup.
- Amnesty International. (2019). Unpaid and Abandoned: The Abuse of Mercury MENA Workers. Amnesty International.
- Amnesty International. (2020). Qatar: Reality Check 2020: Countdown to the 2022 World Cup – Migrant Workers' Rights in Qatar [MDE 22/3297/2020]. Diambil dari <https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/3297/2020/en/>
- Amnesty International. (2021). Reality Check 2021: A Year to the 2022 World Cup. Amnesty International.
- Amnesty Internasional . (2022). "Amnesty Report 2022/23". Diakses dari <https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/qat>

- Amnesty International. (2022). All Work and No Pay: The Struggle of Qatar's Migrant Workers.
- Amnesty International. (2022). Qatar: Predictable and Preventable: Why Qatar's World Cup 'Heat-Stress' Deaths Are a Scandal.
- Amnesty International. (2022). Qatar: 2022 World Cup of Shame: Labour Rights Abuses on the Road to Doha.
- Amnesty International. (2022). "Qatar: Ongoing debate over migrant worker deaths exposes need for truth and compensation.ar/report-qatar". <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/qatar-ongoing-debate-over-migrant-worker-deaths-exposes-need-for-truth-and-compensation/>
- Amnesty International. (2022). Qatar: 'They think that we're machines': Forced labour and other abuse of migrant workers in Qatar's private security sector [MDE 22/5388/2022]. Diambil dari <https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/5388/2022/en/>
- Amir. (2018). "2022 World Cup Qatar: A Tournament for All Arabs." *GulfTimes*.
- Arifin, Y. (2022). "Protes Isu HAM Qatar Menggema di Kongres FIFA". *DetikSport*. From <https://sport.detik.com/sepakbola/bola-dunia/d-6010790/protes-isu-ham-qatar-menggema-di-kongres-fifa>
- Bappenas. (2022). "Hari Amnesti Internasional dan Kaitannya dengan SDGs". from <https://sdgs.bappenas.go.id/hari-amnesti-internasional-dan-kaitannya-dengan-sdgs/>
- Benenson, Peter. (1961). "The Forgotten Prisoners". 28 May
- Brinkerhoff, Jennifer. (2004). "NGOs and the Future of Governance." *Global Governance* 10.2 .2004: 201-224.
- BBC News. (2022). "Migrant worker deaths a 'stain on conscience". *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-60867042>
- Business & Human Rights Resource Centre. (2022). Qatar 2022: NGOs and football groups call on FIFA to establish comprehensive programme to remedy all labour abuses suffered in preparation for World Cup. Diambil dari <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/qatar-2022-ngos-football-groups-call-on-fifa-to-establish-comprehensive-programme-to-remedy-all-labour-abuses-suffered-in-preparation-for-world-cup/>
- CNBC Indonesia. (2022). "Alert! 400-500 Orang Tewas karena Piala Dunia Qatar, Kenapa?. Retrieved March 4, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221130122255-4-392474/alert-400-500-orang-tewas-karena-piala-dunia-qatar-kenapa>
- DetikSport. (2014). "FIFA mulai pertimbangkan Piala Dunia 2022 digelar di musim dingin." *DetikSport*. <https://sport.detik.com/sepakbola/bola-dunia/d-2737936/fifa-mulai-pertimbangkan-piala-dunia-2022-digelar-di-musim-dingin>
- Deutsche Welle. (2021). Dampak reformasi ketenagakerjaan Qatar pada pekerja migran. DW. <https://www.dw.com/id/dampak-reformasi-ketenagakerjaan-qatar-pada-pekerja-migran/a-55132864>
- Deutsche Welle. (2022). "Amnesty International". from <https://www.dw.com/id/amnesty-international/t-45345292>
- Deutsche Welle. (2022), November. "Fact check: How many people have died for the Qatar World Cup?". <https://www.dw.com/en/fact-check-how-many-people-have-died-for-the-qatar-world-cup/a-63763713>

- Edwards, Michael, and David Hulme. (2001). "NGO Performance and Accountability: Beyond the Magic Bullet." *Development and Change* 32.5 2001: 807-832.
- Eropean Parliament. (2013). "Qatar: the situation of migrant workers"  
<https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/qatar-the-situation-of-migrant-workers/product-details/20170529DPU06046>
- FIFA. (2018). "FIFA World Cup Qatar 2022™ to be played in November/December." <https://www.fifa.com/worldcup/news/fifa-world-cup-qatar-2022-to-be-played-in-november-december>
- Fowler, Alan. (2003). "NGOs in the Age of Globalization: New Challenges and Opportunities." *Third World Quarterly* 24.2 (2003): 245-261.
- Freedom House. (2022). The Long Shadow of Qatar's Human Rights Abuses. Diambil dari Freedom House: <https://freedomhouse.org/article/long-shadow-qatars-human-rights-abuses>
- Ganji, S. K. (2016). "Leveraging the World Cup: Mega Sporting Events, Human Rigts Risk, and Worker Welfare Reform in Qatar." *Journal on Migration and Human Security*.
- Government Communications Office of the State of Qatar. (2016). *Government of the State of Qatar's response to Amnesty International report: New name, old system?* <https://www.gco.gov.qa/en/government-of-the-state-of-qatars-response-to-amnesty-international-report-new-name-old-system/>
- Hapsari, D., Putranti, I. R., & Hanura, M., . (2022). "Aktivisme Advokasi Amnesty Internasional dalam menghilangkan Praktik Perbudakan Modern di Qatar: Studi Kasus "Hidden Crime" dibalik Persiapan Piala Dunia 2022" *Journal of International Relations*, 8 (3):472
- Human Rights Watch. (2012). "Building a Better World Cup: Protecting Migrant Workers in Qatar Ahead of FIFA 2022." [https://www.hrw.org/report/2012/06/12/building-better-world-cup/protecting-migrant-workers-qatar-ahead-fifa-2022#\\_ftn3](https://www.hrw.org/report/2012/06/12/building-better-world-cup/protecting-migrant-workers-qatar-ahead-fifa-2022#_ftn3)
- Human Rights Watch. (2014). Qatar. "World Report 2014." <https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/qatar>  
<https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/qatar>
- Human Rights Watch. (2020). "Qatar: Wage Abuse Action Shortchanges Workers." <https://www.hrw.org/news/2020/12/22/qatar-wage-abuse-action-shortchanges-workers>
- Human Rights Watch. (2022). FIFA: Bayar Ganti Rugi atas Kerugian Pekerja Migran Qatar. <https://www.hrw.org/news/2022/05/18/fifa-pay-harm-qatars-migrant-workers>
- Human Rights Watch. (2022). "World Report 2022: Qatar". <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/qatar>
- Human Rights Watch. (2022). "Qatar: World Cup chief publicly admits high migrant death tolls." <https://www.hrw.org/news/2022/11/30/qatar-world-cup-chief-publicly-admits-high-migrant-death-tolls>
- International Labour Organization. (2020). "Qatar Labour Reforms: Progress and Challenges." ILO.
- International Labour Organization (ILO). (2021). "Occupational safety and health in the context of the COVID-19 pandemic." [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_protect/---protrav/---](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---)

- safework/documents/publication/wcms\_745963.pdf
- Khan, S. (2019). "FIFA'S Calling Giving Qatar the Red Card." 36, 50-52.
- Koestanto, B. D. (2021). November 16. "Qatar Didesak Akhiri Pelanggaran Pekerja Migran Piala Dunia 2022." *Kompas.id*.  
<https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/11/16/qatar-didesak-akhiri-pelanggaran-pekerja-migran-piala-dunia-2022>
- Liputan6.com. (2022). "Setelah Piala Dunia 2022 Usai, Sejumlah Buruh Migran Ini Ingin Menetap di Qatar." <https://www.liputan6.com/global/read/5146614/setelah-piala-dunia-2022-usai-sejumlah-buruh-migran-ini-ingin-menetap-di-qatar?page=2>
- Le Monde. (2022). "World Cup 2022: The difficulty with estimating the number of deaths on Qatar construction sites". [https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2022/11/15/world-cup-2022-the-difficulty-with-estimating-the-number-of-deaths-on-qatar-construction-sites\\_6004375\\_8.html](https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2022/11/15/world-cup-2022-the-difficulty-with-estimating-the-number-of-deaths-on-qatar-construction-sites_6004375_8.html)
- Lubis, M.S.W. (2021). "Piala Dunia 2022, Pemain Jerman ikut Norwegia Protes HAM di Qatar". *Bisnis.com*.  
<https://bola.bisnis.com/read/20210326/399/1372975/piala-dunia-2022-pemain-jerman-ikut-norwegia-protes-ham-di-qatar>
- Naufal, S. (2021). "Kebijakan Sistem Kafala Pemerintah Qatar Terhadap Pekerja Migran Piala Dunia 2022." Yogyakarta.
- Nurfajiani, R. (2022). "Bobrok Persiapan Piala Dunia Qatar Dibongkar, Pekerja Migran 'Disembunyikan' Jika FIFA Datang". diakses <https://depok.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-095823209/bobrok-persiapan-piala-dunia-qatar-dibongkar-pekerja-migran-disembunyikan-jika-fifa-datang?page=all>
- Patisson, P. (2013). "Qatar's World Cup "slaves"."
- Prakarsa, A.P (2022). "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran pada Piala Dunia Tahun 2022 di Qatar". *Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 4 No.1 (2022): 119-14*
- Pratama, Y. A. (2022). "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Piala Dunia Qatar 2022". *Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Brawijaya*, 10(2), 165-178.
- Pratiwi, A. (2022). "Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Dalam Persiapan Penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar". Skripsi, Universitas Lampung.  
<http://digilib.unila.ac.id/70486/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf>
- Qatar Day. (2020). "FIFA World Cup 2022 Costs & Budget Overview." <https://www.qatarday.com/blog/information/fifa-world-cup-2022-costs-budget-overview/70204>.
- Rahman, M. Abdul. (2022). "Analisis Kebijakan Pemerintah Qatar Dalam Persiapan Penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar melalui Perspektif Soft Power Diplomacy." Yogyakarta.
- Rachman, F. (2022). "11 Hari Sebelum Piala Dunia 2022, Netflix Rilis Serial Dokumenter Skandal FIFA". *Tempo Seleb*.  
<https://seleb.tempo.co/read/1650941/11-hari-sebelum-piala-dunia-2022-netflix-rilis-serial-dokumenter-skandal-fifa>
- Reuters. (2022). "World Cup 2022: How many migrant workers have died in

- Qatar?.” <https://www.reuters.com/lifestyle/sports/world-cup-2022-how-many-migrant-workers-have-died-qatar-2022-11-24/>
- Satria, R. T. W. (2022). “Piala Dunia 2022 dan HAM: Kegagalan Qatar dalam Memenuhi Hak dan Imigran.” *Kumparan*. Diakses dari <https://kumparan.com/radhite-satria/piala-dunia-2022-dan-ham-kegagalan-qatar-dalam-memenuhi-hak-buruh-migran-22D6R64WCLm>
- Sugiarto. (2015). “*Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Thesis*.” Cet. 1 ed. Yogyakarta: Suaka Media. N.P.
- Tsalis, Ahmad. (2015). “Terungkap, Qatar Sogok FIFA Rp.14,2 Triliun Agar Gelar Piala Dunia 2022.” <https://www.bolasport.com/read/311662171/terungkap-qatar-sogok-fifa-rp142-triliun-agar-gelar-piala-dunia-2022>
- The Guardian. (2020). “Organisers of Qatar 2022 World Cup accused over unpaid migrant workers”. <https://www.theguardian.com/football/2020/jun/11/qatar-2022-world-cup-organisers-accused-over-unpaid-migrant-workers>
- The Guardian. (2021). “Qatar World Cup: 6,500 migrant workers have died, say unions.” <https://www.theguardian.com/football/2021/feb/23/qatar-world-cup-6500-migrant-workers-have-died-say-unions>
- U.S. Department of State. (2021). “2020 Country Reports on Human Rights Practices: Qatar”. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/03/QATAR-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf>
- U.S. Department of State. (2022). 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Qatar. <https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/qatar>
- Vaidyanathan, R. (2022). “Keluarga buruh migran yang tewas selama pembangunan fasilitas Piala Dunia Qatar mencari jawaban - 'Anak-anaknya masih kecil, masih perlu biaya’”. *BBC Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72n9091g9ro>
- VOA Indonesia.com . (2022). “PBB: Upah tak dibayar dominasi keluhan pekerja migran di Qatar.” *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-upah-tak-dibayar-dominasi-keluhan-pekerja-migran-di-qatar/6814262.html>
- Voice of America. (2022). “World Cup 2022: Cause of death”
- Walid , C, B. (2022). “Dieksploitasi dan Mati karena Piala Dunia Qatar”. *Indo Progress*. <https://indoprogress.com/2022/11/tumbang-di-qatar/>
- Wijaya, I. (2022). “Pekerja Migran di Qatar Dideportasi karena Protes Gaji Tidak Dibayar”. *IDN Times*. <https://www.idntimes.com/news/world/ifan-wijaya/pekerja-migran-di-qatar-dideportasi-karena-protos-gaji-tidak-dibayar-c1c2>
- Wijayanto, N.W. (2021). “Sistem Politik dan Pemerintahan Qatar Serta Perkembangan Ekonominya Pada Tahun 1971-2017”. Yogyakarta.